

**ANALISIS KELAYAKAN FINANSIAL PENGGUNAAN
SISTEM PARKIR METER UNTUK MENGGANTI SISTEM
PARKIR KONVENSIONAL UNTUK MENINGKATKAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA SURABAYA
(Study Kasus di area parkir Balai kota Surabaya)**

SKRIPSI



Oleh :

Nama : Susi Andriani

Nim : 2013320110

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS DR.SOETOMO
FEBRUARI 2018**

SKRIPSI

**ANALISIS KELAYAKAN FINANSIAL PENGGUNAAN SISTEM PARKIR
METER UNTUK MENGGANTI SISTEM PARKIR KONVENSIONAL
UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
(Study Kasus di area parkir Balai kota Surabaya)**

Oleh :

Nama : Susi Andriani

NIM : 2013320110

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

pada tanggal 15 Februari 2018

Pembimbing

(Drs. Ec. Sugianto, M.Si)

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Ketua Program Studi

(Dr. Nur Sayidah, SE, M.Si, AK, CA)

(Drs. Sutarmin, MM)

DITERIMA OLEH
PANITIA UJIAN SKRIPSI SARJANA STRATA SATU (S1)
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS DR. SOETOMO
SURABAYA

DIPERTAHANKAN DI DEPAN TIM PENGUJI

PADA

Hari :

Tanggal :

SUSUNAN TIM PENGUJI

NO.	NAMA PENGUJI	PENGUJI KE	TANDA TANGAN
1.	Drs. Ec. Sugianto, M.Si	Dosen Pembimbing	
2.	Dr. Meithiana Indrasari, ST. MM	Penguji I	
3.	Dra. Wiwik Budiarti, MM	Penguji II	

SKRIPSI

**ANALISIS KELAYAKAN FINANSIAL PENGGUNAAN SISTEM PARKIR
METER UNTUK MENGGANTI SISTEM PARKIR KONVENSIONAL
UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
(Study Kasus di area parkir Balai kota Surabaya)**

Oleh :

Nama : Susi Andriani

NIM : 2013320110

Telah diterima dan disahkan

pada tanggal

Pembimbing

(Drs. Ec. Sugianto, M.Si)

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Ketua Program Studi

(Dr. Nur Sayidah, SE, M.Si, AK, CA)

(Drs. Sutarmin, MM)

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah kehadiran Allah SWT atas segala rahmat, taufik, dan hidayah-Nya yang dilimpahkan kepada hamba-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Analisis Kelayakan Financial Penggunaan Sistem Parkir Meter Untuk Menggantikan Sistem Parkir Konvensional Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya (Study kasus di area parkir Balai Kota Surabaya)” dengan baik. Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar sarjana program studi Manajemen, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Dr. Soetomo Surabaya.

Pada kesempatan ini dengan kerendahan hati diucapkan rasa terima kasih kepada semua pihak atas segala bantuan, petunjuk serta bimbingannya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Rasa terima kasih yang setinggi-tingginya dihaturkan kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. Bachrul Amiq, SH, MH Selaku Rektor Universitas Dr. Soetomo Surabaya
2. Ibu Dr. Nur Sayidah, SE, M.Si, AK, CA Selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Dr. Soetomo Surabaya
3. Bapak Drs. Sutarmin, MM Selaku ketua jurusan manajemen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Dr. Soetomo Surabaya
4. Bapak Drs. Ec. Sugiarto, M.Si selaku Dosen Pembimbing yang telah dengan sabar meluangkan waktu dan perhatiannya untuk memberikan pengarahan

selama proses penyusunan skripsi ini, sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan sesuai dengan waktunya

5. Bapak/Ibu dosen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Dr. Soetomo Surabaya yang telah mendidik dan membimbing penulis selama mengikuti kuliah.
6. Kepada karyawan , khususnya yang telah bersedia meluangkan waktunya menjadi responden dalam penulisan skripsi ini
7. Kedua orang tua saya, yang telah memberikan bantuan doa restu, moril, materiil, dan dorongan tak terhingga dalam penyelesaian penulisan skripsi ini
8. Kepada seluruh teman-teman seangkatan khususnya manajemen kelas pagi maupun malam yang memberikan banyak ilmu dan memori indah selama masa kuliah. Semoga kita semua disegerakan menjadi sukses dan persaudaraan ini lebih rekat lagi setelah lulus.
9. Kepada semua pihak yang penulis tidak bisa sebutkan satu persatu. Terima kasih banyak atas bantuannya.

Akhir kata semoga Allah SWT memberikan balasan yang semestinya, atas segala kebaikan yang telah diberikannya, dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan semua pihak yang membutuhkan. Amiin.

Surabaya, 10 Februari 2018

Penulis,

Susi Andriani
NIM : 2013320110

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	5
BAB II KAJIAN TEORITIS	
2.1 Penelitian Terdahulu.....	7
2.2 Kajian Teoritis	9
2.2.1 Pendapatan Asli Daerah.....	9
2.2.2 Retribusi Daerah.....	11
2.2.3 Retribusi Parkir.....	17
2.2.4 Parkir.....	27

2.2.5	Parkir Zona	30
2.2.6	Parkir Meter.....	31
2.2.7	Studi Kelayakan Bisnis.....	33
2.3	Kerangka Konseptual	44
BAB III METODE PENELITIAN		45
3.1	Pendekatan Penelitian	45
3.2	Rancangan Penelitian	45
3.3	Lokasi Penelitian	46
3.4	Definisi Operasional, Identifikasi Variabel dan Indikator Variabel	46
3.5	Jenis Sumber Data.....	48
3.6	Teknik Pengumpulan Data	48
3.7	Teknik Analisis	48
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		
4.1	Gambaran Umum Objek Penelitian.....	52
4.2	Data Realisasi Jumlah Kendaraan Parkir.....	60
4.3	Analisis Data.....	69
4.4	Pembahasan.....	80
BAB V PENUTUP		
5.1	Kesimpulan.....	83
5.2	Saran.....	84
DAFTAR PUSTAKA		

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	Tabel rekapitulasi Data Uraian Pekerjaan Pegawai Kantor UPTD Parkir Dinas Perhubungan Kota Surabaya.....	56
Tabel 4.2	Jumlah Parkir/Lokasi di Tepi Jalan Umum	57
Tabel 4.3	Volume Kendaraan Parkir Konvensional.....	61
Tabel 4.4	Tarif Parkir Konvensional.....	62
Tabel 4.5	Daftar Nama Juru Parkir Pada Sistem Konvensional.....	63
Tabel 4.6	Biaya Operasional.....	64
Tabel 4.7	Jumlah Kendaraan Parkir Meter.....	65
Tabel 4.8	Tarif Parkir Meter	65
Tabel 4.9	Biaya Gaji Parkir Pada Sistem Alat Parkir Meter.....	66
Tabel 4.10	Biaya Operasional Parkir Meteran Tahun 2017.....	68
Tabel 4.11	Investasi Parkir Meter.....	69
Tabel 4.12	Proyeksi Jumlah Kendaraan Parkir Konvensional.....	70
Tabel 4.13	Proyeksi Pendapatan Parkir Konvensional.....	70
Tabel 4.14	Proyeksi Volume Kendaraan Parkir Meter.....	71
Tabel 4.15	Proyeksi Pendapatan Kendaraan Parkir Meter.....	72
Tabel 4.16	Proyeksi Biaya Operasional Parkir Konvensional.....	73
Tabel 4.17	Proyeksi Biaya Operasional Parkir Meter.....	73
Tabel 4.18	Proyeksi Pendapatan Bersih Parkir Konvensional.....	74
Tabel 4.19	Proyeksi Pendapatan Bersih Parkir Meter	75
Tabel 4.20	Perbandingan Pendapatan dan Biaya Parkir.....	75

Tabel 4.21 Perhitungan Net Present Value dengan Kas Berbeda.....77

Tabel 4.22 Perhitungan Net Present Value dengan DF 20%..... 77

Tabel 4.23 Perhitungan Net Present Value dengan DF 40%..... 78

Tabel 4.24 Perhitungan Net Present Value dengan Kas Berbeda.....78



ABSTRAK

Penerapan alat parkir meter salah satu upaya menekan kebocoran pendapatan parkir. Untuk mencapai sasaran tersebut maka perlu dilakukan analisis kelayakan pada aspek financial. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis biaya dan pendapatan pada sistem parkir meter, menganalisis biaya dan pendapatan pada sistem parkir konvensional dan menganalisis tingkat kelayakan secara finansial penggantian sistem parkir konvensional menjadi sistem parkir meter.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 tentang Pajak dan Retribusi Daerah adalah “Penerimaan yang berasal dari sumber-sumber pendapatan daerah yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba BUMD, penerimaan dari dinas-dinas dan penerimaanlain-lain serta penerimaan pembangunan (pinjaman daerah).

Pendekatan penelitian yang akan digunakan adalah tipe penelitian deskriptif, teknik pengumpulan data adalah teknik observasi dan documenter. Teknik analisis data dalam penelitian ini perhitungan penilaian kelayakan investasi (Payback Periode (PP), Average Rate of Return (ARR), Net Present Value (NPV), Internal Rate of Return (IRR) dan Profitability Index (PI)).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari perhitungan pendapatan, setiap tahun mengalami peningkatan yang fluktuatif, dari perhitungan periode pengembalian peyback period dapat diketahui bahwa periode pengembalian dari investasi ini terbilang cukup cepat yaitu 3 tahun 2 bulan. Dengan demikian dan dari segi finansial, rencana usaha ini layak untuk diimplemetasikan.

Kata Kunci : Payback Periode (PP), Average Rate of Return (ARR), Net Present Value (NPV), Internal Rate of Return (IRR) dan Profitability Index (PI)

ABSTRACT

Application of parking meter tools is one effort to suppress parking revenue leak. To achieve these targets it is necessary to perform feasibility analysis on the financial aspects. The purpose of this study is to analyze the costs and revenues of meter parking systems, analyze costs and revenues on conventional parking systems and analyze the financial feasibility of replacing conventional parking systems into meter parking systems.

Local Own Revenue (PAD) according to Law no. Law No. 34 of 2000 on Regional Taxes and Levies shall be "Receipts arising from local revenue sources comprising local taxes, regional charges, share of profits of enterprises, receipts from offices and other receipts and development receipts (regional loans).

The research approach that will be used is descriptive research type, data collection technique is observation and documentary technique. Techniques of data analysis in this study calculation penilaian investment feasibility (Payback Period (PP), Average Rate of Return (ARR), Net Present Value (NPV), Internal Rate of Return (IRR) and Profitability Index (PI)).

The results showed that from the calculation of income, each year has increased the fluctuate, from the calculation of peyback period return period can be seen that the return period of this investment is quite fast that is 3 years 2 months. Thus and in financial terms, this business plan is feasible to implement.

Keywords: Payback Period (PP), Average Rate of Return (ARR), Net Present Value (NPV), Internal Rate of Return (IRR) and Profitability Index (PI)

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pesatnya perkembangan yang ada pada saat ini, terutama pada informasi, komunikasi dan transparansi dalam kehidupan masyarakat di segala bidang ekonomi dan perdagangan, hal ini merupakan tanda-tanda globalisasi dunia. Dengan adanya globalisasi tersebut, setiap negara harus dapat mengoptimalkan segala sesuatunya dalam segala bidang. Pembangunan ekonomi merupakan sesuatu tahapan kegiatan menuju Indonesia yang lebih maju lagi. Dalam pembangunan ini masyarakat beserta pemerintahan mampu menjadikan Negara Indonesia sebagai Negara yang lebih mandiri dalam pelaksanaan system pemerintahan.

Pembangunan daerah bertujuan meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat di daerah melalui pembangunan yang serasi dan terpadu baik antar sektor maupun antar pembangunan sektoral dengan perencanaan pembangunan oleh daerah yang efektif menuju tercapainya kemandirian daerah yang merata di seluruh pelosok tanah air.

Dalam peraturan tentang pembagian daerah tercantum dalam pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi; “ Pembagian daerah atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dalam Undang-Undang, dengan memandang dan mengingat dasar pemasyarakatan

dalam system pemerintahan Negara dan hak-hak asal usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa” pemerintah Indonesia memahami dalam memajukan negaranya, telah mengambil keputusan untuk memberikan otonomi daerah yaitu dimana pemerintahan daerah dapat mengatur daerahnya masing-masing. Keputusan yang diambil pemerintahan Indonesia supaya dapat lebih memajukan daerahnya, pemerintah pusat sebagai pengawas dan memberikan subsidi untuk pembangunan daerah.

Dengan adanya pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah di Indonesia ini tidak terlepas dari pemberlakuan undang-undang pajak daerah dan retribusi daerah yang baru yakni adanya undang-undang No. 18 Tahun 1997 dan UU No. 34 tahun 2000 UU No. 19 tahun 1999 lahir seagai upaya untuk merubah sistem perpajakan daerah dan retribusi daerah yang berlangsung di Indonesia yang banyak menimbulkan kendala baik dalam penempatan dan pemungutannya.

Penerimaan daerah merupakan sumber pembiayaan pembangunan daerah dan penyelenggaraan pemerintah daerah. Sumber penerimaan daeran terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba usaha daerah. Salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD) kota Surabaya adalah dari sektor retribusi parkir. Mengingat Kota Surabaya merupakan kota terbesar kedua dari Ibu kota Jakarta. Dimana terdapat banyak sarana yang dapat dijadikan sebagai alokasi lahan parkir. Ketersediaan dan biaya parkir untuk parkir adalah pertimbangan yang sangat penting bagi seseorang memutuskan bagaimana cara melakukan perjalanannya. Apakah menggunakan kendaraan pribadi atau kendaraan umum. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi di Kota Surabaya memberikan dampah bagi peningkatan

kepemilikan kendaraan. Dengan banyaknya tingkat kepemilikan kendaraan yang tinggi menimbulkan masalah lalu lintas terkait kemacetan dan ketidaktertiban di kota Surabaya. Banyaknya masalah kompleks yang timbul dari parkir. Beberapa masalah tersebut adalah penataan parkir yang kurang teratur, parkir di badan jalan, parkir di pedestrian, perbedaan biaya di setiap lokasi parkir dan parkir liar.

Keberadaan parkir tepi jalan umum timbul akibat adanya Demand masyarakat pada lokasi tersebut sebagai tempat perdagangan, perkantoran, pendidikan, pusat pembelanjaan dan lain-lain yang belum didukung tersedianya parkir halaman. Hal ini dapat menimbulkan kemacetan jika kondisi jalan didepannya memiliki volume lalu lintas yang tinggi. Selain itu juga rawan terjadi kebocoran pendapatan akibat cara pembayaran langsung yang tidak transparan. Kontribusi sektor perpakiran disebabkan oleh tingginya kebocoran pendapat retribusi parkir tepi jalan umum, akibatnya semakin banyak pemungutan parkir tepi jalan umum liar, tidak kesesuaian penyetoran hasil retribusi parkir. Pengawasan dan pengendalian operasional parkir tepi jalan umum oleh UPTD parkir tepi jalan umum juga tidak berjalan baik, hal ini dikarenakan jumlah sumber daya manusia yang terbatas serta sarana dan prasarana yang relatif kurang.

Kondisi sistem pengelolaan parkir tepi jalan umum belum terorganisir. Pemungutan dilakukan oleh juru parkir yang umumnya berstatus pegawai dan berseragam lengkap dari UPTD parkir tepi jalan umum. Namun akibat keterbatasan jumlah sumber daya manusia para juru parkir akan dibantu oleh pembantu juru parkir yang terkadang perekrutannya tidak terkoordinasi dengan kantor pusat parkir tepi jalan umum. Bahkan pada lokasi-lokasi tertentu, dengan kata lain

diperjual belikan kepada orang lain hanya bermodalkan seragam yang mudah dibeli pada pusat konveksi pakaian seragam oknum perseorangan dapat melakukan pemungutan retribusi dengan mudahnya dan lemahnya regulas terkait mekanisme pengelolaan parkir tepi jalan umum menjadikan standar operasional pegawai tidak berjalan dengan baik dan penegakan denda parkir liar menjadi tidak jelas.

Sebagai bentuk pembenahan manajemen pengelolaan parkir tepi jalan umum oleh UPTD parkir tepi jalan umum dilakukan perencanaan pengelolaan parkir dengan menggunakan teknologi yang berbasis teknologi informasi yaitu alat parkir meter. Penerapan alat parkir meter salah satu upaya menekan kebocoran pendapatan parkir menurut kepala Dinas Perhubungan Surabaya Irvan Wahyudrajat. Namun, sementara masih percobaan hanya ada 6 titik alat parkir meter di jalan Sedap malam dan 4 titik alat parkir meter di jalan Jimerto Dengan sistem ini pendapatan yang diterima pada alat parkir akan dapat secara real time oleh server pada kantor UPTD parkir tepi jalan umum dan pendapatan parkir akan meningkat 100% dibanding sebelumnya. Untuk mencapai sasaran tersebut maka perlu dilakukan analisis kelayakan pada aspek financial.

Berdasarkan uraian diatas, terlihat bahwa penerimaan retribusi parkir akan meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk mengetahuinya dan menuangkan dalam bentuk skripsi berjudul **“Analisis Kelayakan Financial Penggunaan Sistem Parkir Meter untuk Menggantikan Sistem Parkir Konvensional Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah kota Surabaya (Study Kasus di Area Parkir Balai Kota Surabaya)”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Berapa besar biaya dan pendapatan menggunakan sistem parkir meter ?
2. Berapa besar biaya dan pendapatan menggunakan sistem parkir konvensional ?
3. Apakah penggantian sistem tersebut secara financial layak untuk dilakukan?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis biaya dan pendapatan pada sistem parkir meter.
2. Untuk menganalisis biaya dan pendapatan pada sistem parkir konvensional.
3. Untuk menganalisis tingkat kelayakan secara finansial penggantian sistem parkir konvensional menjadi sistem parkir meter.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Bagi penulis

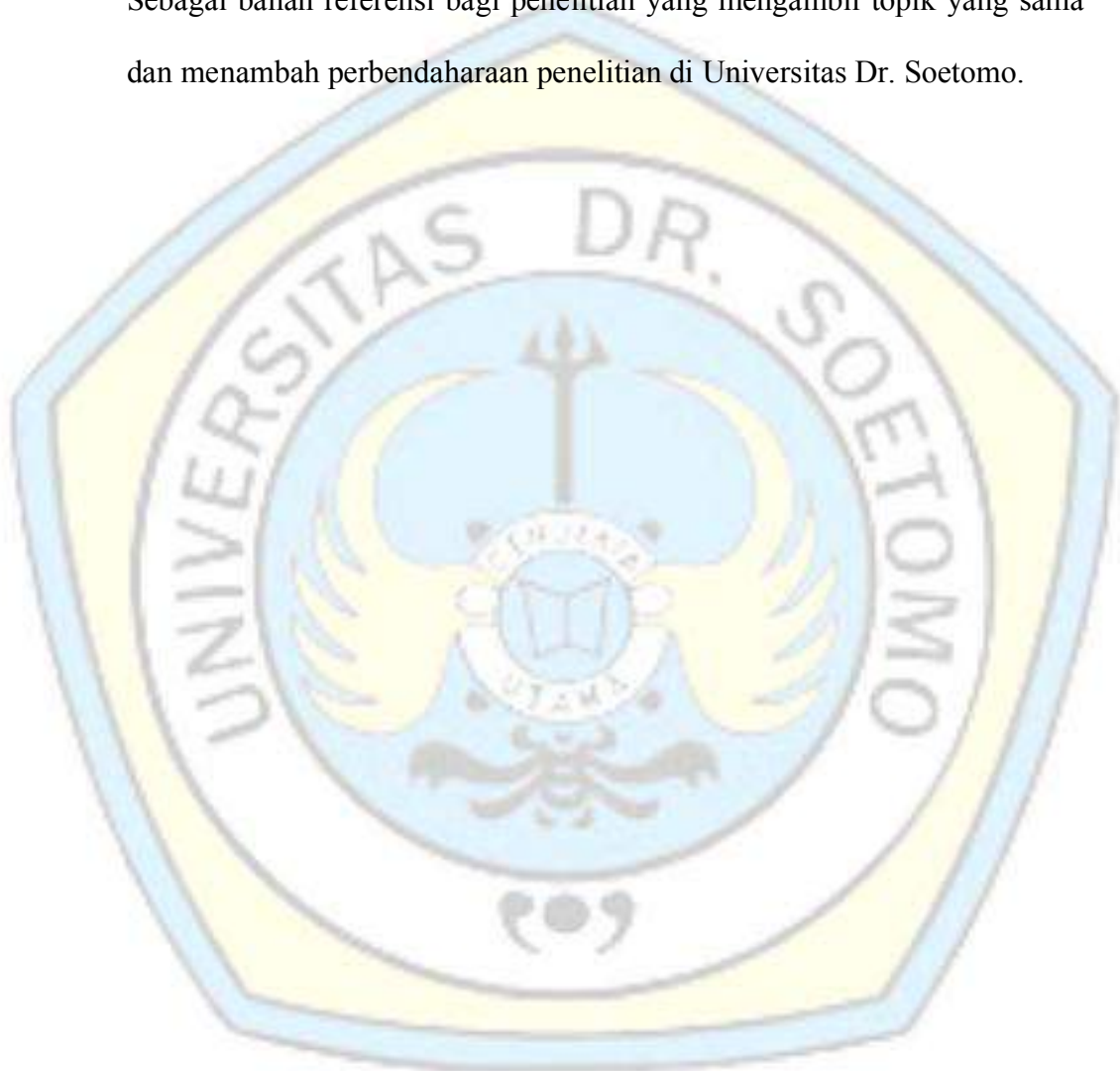
untuk memperoleh gambaran tentang pokok masalah yang ada di objek penelitian (perusahaan) dan membandingkan dengan teori yang diperoleh selama perkuliahan.

2 Bagi perusahaan

Penelitian ini berguna sebagai bahan masukan bagi perusahaan terhadap pokok masalah yang telah disesuaikan dengan teori yang ada.

3 Bagi almamater

Sebagai bahan referensi bagi penelitian yang mengambil topik yang sama dan menambah perbendaharaan penelitian di Universitas Dr. Soetomo.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Sugiarti (2015) melakukan penelitian dengan judul "Potensi Retribusi Parkir Sebagai Salah Satu Sumber Pendapatan Asli Kota Kediri". Menurut Sugiarti, penelitian ini mengemukakan bahwa ada beberapa faktor yang saling berkaitan dan harus dilakukan untuk lebih mengoptimalkan penerimaan retribusi parkir, antara lain pemungutan retribusi parkir lebih efektif, peningkatan ketertiban petugas pemungut dan peningkatan pelayanan parkir yang diberikan. Untuk itu diperlukan perbaikan sistem pemungutan retribusi parkir, salah satunya dengan system parkir berlangganan, sehingga tujuan optimalisasi realisasi penerimaan retribusi parkir di Kota Kediri akan dapat tercapai.

1. Persamaan : sama-sama menganalisis tentang retribusi parkir untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD)
2. Perbedaan : tidak menganalisis penilaian kelayakan investasi

Mega indah mujiningsih (2013) melakukan penelitian dengan judul "Analisis Kelayakan Usaha dan Strategi Pengembangan Industri Kecil Tempe di kecamatan Matesih kabupaten Karanganyar" penelitian ini bertujuan untuk mengetahui profil usaha, mengetahui kelayakan finansial, dan mengetahui strategi sektor industri. Analisis kelayakan menggunakan analisis Net Present Value (NPV), Internal rate of return (IRR), Net Benefit Cost Ratio (BCR), untuk

mengetahui layak atau tidaknya. populasi yang diambil dalam penelitian ini seluruh industri kecil tempe di kecamatan Matesih dengan berjumlah 80 industri kecil tempe. Metode yang digunakan adalah metode Deskriptif kuantitatif, instrumen penelitian yaitu dokumentasi, observasi, wawancara, angket/kuisisioner. Kesimpulan yang dapat diambil yaitu menunjukkan bahwa industri kecil tempe di Kecamatan Matesih berjumlah 80 unit usaha dan mampu 53 orang tenaga kerja. Analisis kelayakan NPV dari industri kecil tempe di kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar layak dilakukan. Nilai BCR adalah sebesar 1,37 layak dilakukan. Nilai IRR adalah sebesar 38,72% layak dilakukan. Rekomendasi yang diberikan dari penelitian ini adalah hendaknya generasi muda memperhatikan usaha tempe karena industri adalah industri yang layak dikembangkan dengan menjanjikan keuntungan yang besar.

1. Persamaan : menganalisis penilaian kelayakan dengan teknik analisis yang sama
2. Perbedaan : tidak menganalisis pendapatan dan biaya parkir untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Rahmawati Widya Putri (2016) melakukan penelitian dengan judul “ Analisis Kontibusi Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah kabupaten Malang” penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kontribusi parkir terhadap pendapatan asli daerah (PAD) metode yang digunakan adalah metode Deskriptif kuantitatif, instrumen penelitian yang digunakan berupa observasi, dokumentasi dan wawancara. Data yang digunakan yaitu data primer berupa wawancara dan data sekunder berupa data realisasi. Kesimpulan yang dapat diambil yaitu

kontribusi parkir terhadap pendapatan asli daerah kabupaten malang mengalami fluktuasi. Hal ini dikarenakan realisasi parkir yang dicapai hanya terfokus pada pencapaian target saja tanpa memperhitungkan historis kenaikan pertumbuhan realisasi retribusi parkir tiap tahun.

1. Persamaan : sama-sama menggunakan metode Deskriptif kuantitatif
2. Perbedaan : tidak menggunakan data primer dan teknik pengambilan data dengan wawancara dan dokumentasi

2.2. Kajian Teoritis

2.2.1. Pendapatan Asli Daerah

2.2.1.1. Pengertian

Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 tentang Pajak dan Retribusi Daerah adalah” Penerimaan yang berasal dari sumber-sumber pendapatan daerah yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba BUMD, penerimaan dari dinas-dinas dan penerimaanlain-lain serta penerimaan pembangunan (pinjaman daerah)”.

Pendapatan Asli Daerah merupakan tulang punggung pembiayaan daerah, oleh karenanya kemampuan melaksanakan ekonomi diukur oleh besarnya kontribusi yang diberikan oleh pendapatan asli daerah terhadap APBD, semakin besar kontribusi yang dapat diberikan oleh Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD

berarti semakin kecil ketergantungan pemerintah daerah terhadap bantuan pemerintah pusat.

2.2.1.2. Sumber Pendaptan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah diharapkan dapat menjadi sumber utama dalam membiayai urusan rumah tangga daerah. Semakin banyak kegiatan daerah yang dibiayai oleh Pendapatan Asli Daerah, berarti semakin tinggi kualitas otonomi daerah sehingga akan memperkuat posisi keuangan daerah. Adapun sumber-sumber PAD yaitu:

1. Hasil Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah pungutan daerah menurut peraturan pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk pembiayaan rumah tangganya sebagai badan hukum publik.

2. Hasil Retribusi Daerah

Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu, yang khusus disediakan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan

Daerah yang Dipisahkan Jenis Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan terdiri dari: bagian laba atas penyertaan modal BUMD, bagian laba atas penyertaan modal BUMN, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

4. Lain-lain PAD yang Sah

Yang termasuk dalam lain-lain PAD yang Sah antara lain hasil penjualan asset daerah, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan barang atau jasa oleh daerah.

2.2.2. Retribusi Daerah

2.2.2.1. Pengertian

Dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pengertian retribusi daerah adalah “Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan”. Dalam retribusi daerah terdapat tiga hal yang perlu diperhatikan :

1. Adanya pelayanan langsung yang diberikan sebagai imbalan pungutan yang dikenakan.
2. Terdapat kebebasan dalam memilih pelayanan.
3. Ongkos pelayanan tidak melebihi dari pungutan yang dikenakan untuk pelayanan yang diberikan.

2.2.2.2. Objek Retribusi Daerah

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Pasal 18 ayat 1 menentukan bahwa objek retribusi adalah berbagai jenis jasa tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah. Tidak semua jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah dapat dipungut retribusinya, tetapi hanya jenis-jenis jasa tertentu yang menurut pertimbangan sosial-ekonomi layak dijadikan sebagai objek retribusi. Jasa tertentu tersebut dikelompokkan ke dalam tiga golongan, yaitu jasa umum, jasa usaha dan perizinan tertentu.

1. Retribusi Jasa umum

Objek retribusi jasa umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

2. Retribusi Jasa usaha

Objek retribusi jasa usaha adalah jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah, dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

3. Retribusi Perizinan Tertentu

Objek retribusi perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan

pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

2.2.2.3. Subjek Retribusi Daerah

1. Subjek retribusi jasa umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan. Subjek retribusi jasa umum dapat ditetapkan menjadi wajib retribusi jasa umum, yaitu orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi jasa umum.
2. Subjek retribusi jasa usaha adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan. Subjek ini dapat merupakan wajib retribusi jasa usaha.
3. Subjek retribusi perizinan tertentu adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu dari pemerintah daerah. Subjek ini dapat merupakan wajib retribusi jasa perizinan tertentu.

2.2.2.4. Ciri-Ciri Pokok Retribusi Daerah

Beberapa ciri yang melekat pada retribusi daerah yang saat ini dipungut di Indonesia adalah sebagai berikut (Siahaan 2005: 7):

1. Retribusi merupakan pungutan yang dipungut berdasarkan Undang-Undang dan Peraturan Daerah yang berkenaan.

2. Hasil penerimaan retribusi masuk ke kas pemerintah daerah.
3. Pihak yang membayar retribusi mendapatkan kontra prestasi (balas jasa) secara langsung dari pemerintah daerah atas pembayaran yang dilakukannya.
4. Retribusi terutang apabila ada jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang dinikmati oleh orang atau badan.
5. Sanksi yang dikenakan pada retribusi daerah adalah sanksi secara ekonomis, yaitu jika tidak membayar retribusi, tidak akan memperoleh jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

2.2.2.5. Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah

Sesuai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Pasal 26, pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan. Artinya seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan. Jika wajib retribusi tertentu tidak membayar, akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar dua persen setiap bulan dari retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD).

2.2.2.6. Jenis-Jenis Retribusi Daerah

Berdasarkan kelompok jasa yang menjadi objek retribusi daerah dapat dilakukan penggolongan retribusi daerah. Penggolongan jenis retribusi dimaksudkan guna menetapkan kebijakan umum tentang prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi daerah. Sesuai Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Pasal 18 ayat 2, retribusi daerah dibagi atas tiga golongan, yaitu:

1. Retribusi jasa umum, yaitu retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Jenis-jenis retribusi jasa umum diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Pasal 2 ayat 2, sebagaimana di bawah ini :
 - a. Retribusi Pelayanan Kesehatan
 - b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
 - c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil
 - d. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
 - e. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
 - f. Retribusi Pelayanan Pasar
 - g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
 - h. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
 - i. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta

- j. Retribusi Pengujian Kapal Perikanan
2. Retribusi jasa usaha, yaitu retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

Jenis-jenis retribusi jasa usaha terdiri dari:

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
 - b. Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan
 - c. Retribusi Tempat Pelelangan
 - d. Retribusi Terminal
 - e. Retribusi Tempat Khusus Parkir
 - f. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa
 - g. Retribusi Penyedotan Kakus
 - h. Retribusi Rumah Potong Hewan
 - i. Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal
 - j. Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga
 - k. Retribusi Penyebrangan di Atas Air
 - l. Retribusi Pengolahan Limbah Cair
 - m. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
3. Retribusi perizinan tertentu, yaitu retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang,

prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Jenis-jenis retribusi perizinan tertentu terdiri dari :

- a. Retribusi izin mendirikan bangunan
- b. Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol
- c. Retribusi izin gangguan
- d. Retribusi izin trayek

2.2.3. Retribusi Parkir

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagaimana pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi parkir sebagaimana halnya masuk dalam pajak daerah dan merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat. Retribusi parkir adalah pembayaran atas penggunaan jasa pelayanan tempat parkir yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Objek retribusi umum adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Tarif parkir merupakan retribusi atas penggunaan lahan parkir Dipinggir jalan yang besarnya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/ Kota berdasarkan UU tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah yang selanjutnya ditetapkan ditingkat Kabupaten/Kota dengan Peraturan Daerah. Untuk mengoptimalkan pendapatan dari tarif parkir adalah dengan mengawasi proses dari pada retribusi parkir itu apakah sudah berjalan sesuai Peraturan Daerah yang berlaku.

Penetapan tarif parkir merupakan salah satu perangkat yang digunakan sebagai alat dalam kebijakan manajemen lalu lintas di suatu kawasan/kota untuk membatasi penggunaan kendaraan pribadi menuju ke suatu kawasan tertentu yang perlu dikendalikan lalu lintasnya dan merupakan salah satu pendapatan asli daerah yang penting. Prinsip dan sasaran tarif retribusi parkir bisa saja berbeda sesuai keputusan pemerintah daerah, misalnya dalam penetapan tarif retribusi parkir di tepi jalan umum yang rawan kemacetan dapat ditetapkan lebih tinggi dari pada di tepi jalan umum yang kurang rawan kemacetan dengan sasaran mengendalikan tingkat pengguna jasa parkir sehingga tidak menghalangi kelancaran lalu lintas. Dasar pengenaan retribusi parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar untuk pemakaian tempat parkir. Dasar pengenaan pajak didasarkan pada klasifikasi tempat parkir, daya tampung dan frekwensi kendaraan bermotor, setiap kendaraan bermotor yang parkir ditempat parkir diluar badan jalan akan dikenakan tarif parkir yang ditetapkan oleh pengelola. Tarif parkir ini merupakan pembayaran yang harus diserahkan oleh pengguna tempat parkir untuk pemakaian tempat parkir. Tarif parkir yang ditetapkan oleh pengelola tempat parkir diluar badan jalan yang memungut bayaran disesuaikan tarif parkir yang

ditetapkan oleh pemerintah kabupaten. Pemungutan retribusi parkir adalah salah satu dari pelaksanaan otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab sebagai mana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 tentang pemerintah daerah merupakan upaya pemerintah daerah dalam menggali dan mengembangkan potensi daerah dalam rangka untuk memperoleh dana sehubungan dengan penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan daerah. Untuk membawa daerah pada derajat otonomi yang berarti dan mengarah pada kemandirian daerah, faktor kemampuan keuangan daerah merupakan ciri utama yang menunjukkan suatu daerah otonom mampu berotonomi, self-supporting keuangan merupakan salah satu bobot penyelenggaraan otonomi ini artinya daerah otonom memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pembangunan daerah. Dukungan keuangan ini ditandai dengan semakin besarnya nilai PAD dan semakin menurunkan dukungan pusat dalam bentuk sumbangan/bantuan.

Sumber – sumber penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi menurut Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah terdiri dari 7:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
2. Dana Perimbangan
3. Lain-lain Pendapatan

Pendapatan asli daerah merupakan faktor terpenting dalam pelaksanaan otonomi daerah, dalam menetapkan target penerimaan dari pos ini seharusnya dilakukan dengan terlebih dahulu menganalisis potensi daerah yang ada. Dengan analisis potensi yang dilaksanakan tiap tahun, maka diharapkan daerah dapat memanfaatkan potensi yang ada semaksimal mungkin demi kepentingan pembangunan di daerahnya. Semakin besar kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), maka daerah akan semakin mampu melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan semakin lancar. Ketika pemerintah daerah sedang melakukan usaha meningkatkan pendapatan asli daerahnya, maka hal yang harus dipertimbangkan adalah bebanyang harus ditanggung masyarakat. Disatu sisi peningkatan PAD akan mempengaruhi tingkat kemampuan daerah, tetapi disisi lain juga berarti peningkatan beban masyarakat. Hal ini karena obyek pemungutan akhir adalah masyarakat.

2.2.3.1. Gambaran Umum Retribusi Parkir Kota Surabaya

Surabaya merupakan daerah nomor dua sebagai daerah terkaya dan berpenghasilan terbesar tahun 2012. Hal ini disebabkan peran pemerintah daerah Surabaya yang terus berupaya menggali setiap potensi pendapatan yang ada di Kota Surabaya baik dalam bentuk tindakan nyata maupun kebijakan-kebijakan atau regulasi. Salah satu produk kebijakan atau regulasi Kota Surabaya yang mengatur tentang retribusi daerah adalah Perda nomor 1 Tahun 2009

tentang penyelenggaraan perpajakan dan retribusi parkir. Retribusi parkir kota Surabaya merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang berpotensi besar dalam PAD Kota Surabaya. Pengaturan atau regulasi tentang retribusi perpajakan di Kota Surabaya sangat perlu dilakukan. Hal ini disebabkan adanya potensi jumlah kendaraan bermotor di Kota Surabaya yang semakin meningkat setiap tahunnya. Dengan adanya regulasi tersebut pemungutan yang dilakukan akan dapat dilaksanakan dengan baik. Besarnya tarif retribusi akan dilakukan peninjauan kembali serta penyesuaian dalam jangka waktu tiga tahun sekali. Peraturan atau regulasi terbaru mengenai perpajakan Kota Surabaya diatur dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2012 mengenai Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum dan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2012 mengenai Retribusi Tempat Khusus Parkir. Dua peraturan terbaru ini merupakan produk hukum terbaru menggantikan peraturan sebelumnya, yaitu Perda No 1 Tahun 2009 yang sebelumnya tidak memisahkan antara retribusi parkir tepi jalan umum dengan retribusi parkir khusus. Pada tahun 2015, untuk melakukan peninjauan kembali tarif parkir di tepi jalan umum, maka Pemerintah Kota Surabaya menetapkan Peraturan Walikota No. 36 Tahun 2015 sebagai pengganti tarif pada Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2012. Untuk menerapkan aturan tersebut agar konsekuen, maka secara teknis pelaksanaan di atur oleh UPTD Parkir Dinas Perhubungan Kota Surabaya, sedangkan untuk realisasi

pendapatan retribusi nya dikelola oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Surabaya.

1. UPTD Parkir Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya Dalam menjalankan tugasnya, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya memiliki Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD), jika menangani masalah parkir yaitu UPTD Parkir. UPTD Parkir sebagai unsur pelaksana teknis tertentu mempunyai tugas pokok memberi petunjuk, membagi tugas, membimbing, memeriksa, mengoreksi, mengawasi, merencanakan dan melaksanakan kegiatan teknis operasional urusan parkir. Untuk menyelenggarakan tugas pokok nya, UPTD Parkit mempunyai fungsi :
 - a. Perencanaan kegiatan kerja UPTD Parkir
 - b. Pemberian petunjuk pelaksanaan urusan parkir
 - c. Pembagian tugas pelaksanaan UPTD Parkir
 - d. Pembimbingan pelaksanaan tugas UPTD Parkir
 - e. Pemeriksaan dan pengawasan pelaksanaan urusan parkir
 - f. Pelaksanaan penyelenggaraan urusan parkir
 - g. Pengoreksian pelaksanaan tugas UPTD Parkir
 - h. Pengawasan bawahan dalam lingkup bidang tugasnya
 - i. Pelaporan pelaksanaan tugas UPTD Parkir

Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya berdasarkan arahan atasan dalam lingkup bidang tugasnya. Dalam menjalankan tugasnya, UPTD Parkir membawahi :

1. Sub Bagian Tata Usaha sebagai unsur staf atau administrasi mempunyai tugas pokok memberi petunjuk, membagi tugas, membimbing, memeriksa, mengoreksi, mengawasi dan merencanakan kegiatan urusan keorganisasian dan ketatalaksanaan, umum, kepegawaian, perlengkapan, program dan pelaporan serta keuangan dalam rangka mendukung mekanisme kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD). Untuk menyelenggarakan tugas pokoknya, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
 2. Perencanaan kegiatan kerja Sub Bagian Tata Usaha meliputi urusan keorganisasian dan ketatalaksanaan, umum, kepegawaian, perlengkapan, program dan pelaporan serta keuangan.
 3. Pemberian petunjuk pengelolaan urusan keorganisasian dan ketatalaksanaan, umum, kepegawaian, perlengkapan, program dan pelaporan serta keuangan.
 4. Pembagian tugas pengelolaan urusan keorganisasian dan ketatalaksanaan, umum, kepegawaian, perlengkapan, program dan pelaporan serta keuangan.
 5. Pembimbingan pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Usaha.

6. Pemeriksaan dan pengawasan pengelolaan urusan urusan keorganisasian dan ketatalaksanaan, umum, kepegawaian, perlengkapan, program dan pelaporan serta keuangan .
7. Pengoreksian pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Usaha
8. Pengawasan bawahan dalam lingkup bidang tugasnya
9. Pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Usaha
10. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya berdasarkan arahan atasan dalam lingkup bidang tugasnya.

2.2.3.2. Bidang Pembukuan dan Pengembangan Potensi Dinas Pendapatan kota Surabaya

Dinas Pendapatan Daerah adalah merupakan alat pelaksana utama Gubernur dalam penyelenggaraan urusan rumah tangga Daerah di bidang Pendapatan Daerah. Dalam melaksanakan tugasnya sebagai alat pelaksana sebagaimana tersebut. Dinas Pendapatan Daerah berada sepenuhnya di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur. Sedangkan tugas pokok Dinas Pendapatan Daerah adalah merencanakan dan melaksanakan tugas-tugas Pemerintah Daerah dalam menggali sumber-sumber Pendapatan Daerah secara efektif sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku serta garis-garis kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur. Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Dinas Pendapatan Daerah menyelenggarakan tugas umum sebagai berikut :

1. Mengikuti perkembangan keadaan secara terus-menerus dan memperhatikan akibat atau pengaruh-pengaruh dari keadaan itu terhadap pelaksanaan tugas pokok.
2. Mengumpulkan, mensistimatisasikan dan mengolah data serta bahan-bahan mengenai atau yang berhubungan dengan pendapatan.
3. Membuat rancangan-rancangan Peraturan Daerah dalam bidang Pendapatan Daerah dan rancangan keputusan pelaksanaannya yang diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pokok.
4. Memberikan saran dan atau pertimbangan kepada Gubernur sebagai bahan guna menetapkan kebijaksanaan dan atau mengambil keputusan.
5. Mempersiapkan ketentuan-ketentuan pelaksanaan kebijaksanaan di bidang pemungutan Daerah.
6. Meneliti Peraturan Daerah Tingkat II yang berhubungan dengan pemungutan dan penerimaan Pendapatan Daerah Tingkat II.

Sudah terlihat jelas bahwa retribusi daerah merupakan wewenang dari Dinas Pendapatan Daerah. Parkir merupakan salah satu aspek yang dapat diretribusi. Untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) diperlukan upaya-upaya yang harus dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah. Pihak Dinas Pendapatan Daerah, dari

tahun ke tahun selalu mengadakan evaluasi terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah, baik itu mengenai hambatan dalam peungutan retribusi maupun upaya yang akan dilakukan untuk peningkatan jumlah penerimaan retribusi daerah terutama dalam hal ini retribusi parkir. Upaya yang dilakukan oleh dinas pendapatan Daerah dalam rangka peningkatan pendapatan retribusi parkir tidak dapat terlepas dari kapasitas administrasi yang tersedia di Pemerintah Kota Suraba dan Dinas Pendapatan Daerah khususnya. Upaya yang telah, sedang dan akan dilakukan adalah sebagai berikut.

1. Insentififikasi pendataan obyek retribusi parkir guna menjamin aktualisasi data.
2. Melakukan survei potensi ke lokasi untuk melihat apakah lokasi tersebut mampu ditingkatkan potensi lahan parkirnya, baik dengan pelebaran luas area parkir maupun daya tMencari obyek retribusi parkir yang baru apabila dimungkinkan ada.
3. Pengawasan internal dan penyuluhan secara intensif terhadap para petugas parkir dengan melakukan pembinaan langsung oleh pimpinan unit kerja guna meningkatkan motovasi pegawai dan peningkatan kinerja.
4. Meningkatkan keahlian dan kemampuan aparat pajak dengan meberikan pembinaan yang lebih intensif.
5. Menjalin koordinasi kooperatif yang melibatkan instansi lainnya dala hal penyediaan lahan parkir yang layak dan memadai.

6. Melakukan audit lapangan, disamping ditemukan penyimpangan dari wajib retribusi juga dapat diketahui penyimpangan dari para aparat.
7. Mengadakan perubahan Peraturan Daerah (revisi tarif), apabila Perda yang sudah berlaku tidak sesuai dengan perkembangan yang ada.

2.2.4. Parkir

2.2.4.1. Pengertian Parkir

Parkir adalah tempat pemberhentian kendaraan dalam jangka waktu pendek atau lama, sesuai dengan kebutuhan pengendara. Parkir merupakan salah satu unsur prasarana transportasi yang tidak terpisahkan dari sistem jaringan transportasi, sehingga pengaturan parkir akan mempengaruhi kinerja suatu jaringan, terutama jaringan jalan raya.

Daerah perkotaan dengan kepadatan penduduk dan tingkat ekonomi yang tinggi mengakibatkan tingkat kepemilikan kendaraan pribadi yang tinggi pula. Apabila kondisi ini didukung dengan kebijakan pemerintah dalam manajemen lalu lintas yang tidak membatasi penggunaan mobil pribadi, maka akan mendukung pelaku pergerakan untuk selalu menggunakan kendaraan pribadi. Hal ini akan menimbulkan kebutuhan lahan parkir yang besar pada zona tarikan sebagai contoh pada daerah pusat bisnis. Tidak semua pengembang pusat bisnis mampu

menyediakan lahan parkir yang mencukupi, sehingga badan jalan yang berada disekitarnya digunakan untuk lahan parkir. Apabila badan jalan tersebut dilalui lalu lintas dalam jumlah yang cukup besar maka bisa dipastikan bahwa parkir di badan jalan akan menimbulkan permasalahan lalu lintas (kecepatan menurun dan waktu tempuh meningkat).

Timbulnya permasalahan parkir dikota-kota besar menurut para ahli transportasi untuk betul-betul memahami parkir. Konsep dan karakteristik parkir, analisis kebutuhan parkir, perencanaan geometrik lahan parkir, dan kebijakan parkir merupakan materi bisa diimplementasikan untuk menangani permasalahan parkir.

2.2.4.2. Jenis Parkir

1. Menurut penempatannya

- a. Parkir di Tepi Jalan Umum (On-street parking). Yakni Parkir dengan menggunakan badan jalan sebagai tempat parkir.
- b. Parkir diluar badan jalan (off-street parking). Yakni parkir kendaraan diluar badan jalan bisa dihalaman gedung perkantoran, supermarket, atau pada taman parkir.

2. Menurut statusnya

- a. Parkir umum, biasanya dikelola oleh pemerintah daerah
- b. Parkir khusus, dikelola oleh swasta

- c. Parkir darurat, diselenggarakan karena adanya kegiatan insidental
- d. Parkir Zona, parkir yang sudah ditentukan kawasan tertentu dan tarif tersendiri.
- e. Taman parkir, dikelola oleh pemerintah
- f. Gedung parkir, biasanya diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan pengelolaannya oleh swasta.

3. Menurut jenis kendaraan

- a. Kendaraan tidak bermesin (sepeda)
- b. Sepeda motor
- c. Mobil
- d. Mini bus
- e. Truck

4. Menurut jenis tujuan parkir

- a. Parkir penumpang : untuk kebutuhan menaikkan dan menurunkan penumpang
- b. Parkir Barang : untuk kebutuhan bongkar muat barang

5. Menurut jenis kepemilikan dan pengoperasian

- a. Milik swasta dan dikelola oleh swasta
- b. Milik pemerintah daerah dan dikelola oleh Dinas Perhubungan
- c. Milik pemerintah daerah dan dikelola oleh Pemda

2.2.5. Parkir Zona

2.2.5.1 Pengertian

Penerapan parkir Zona ini berdasarkan surat keputusan (SK) Kepala Dinas Perhubungan (KADISHUB) kota Surabaya nomor 188.45/5491/436.7.1.14/2017 tentang penerapan kawasan parker zona di kota Surabaya serta peraturan Wali kota Surabaya nomor 3 tahun 2017 tentang pedoman penetapan Parkir Zona di kota Surabaya. Adapun 10 kawasan parkir Zona yang telah ditentukan dalam SK kadishub tertanggal 10 maret 2017 antara lain wilayah Jembatan Merah, Tugu Pahlawan, Tunjungan, Blauran, Embong Malang, Pasar Atom, Taman Bungkul, Balai Kota Surabaya, Kertajaya, dan Keputran.

Sesuai Perda Nomor 1 Tahun 2009 tentang penyelenggaraan Perparkiran dan retribusi parker, definisi Parkir Zona adalah suatu bentuk pelayanan jasa parkir, dengan ditetapkan tarif parkir tersendiri untuk setiap zona atau kawasan tertentu. Jadi ada tarif tertentu untuk kawasan yang telah ditentukan.

2.2.5.2. Pelaksanaan Parkir Zona

Atas pelayanan parkir di lokasi parkir zona dapat dipungut retribusi sesuai dengan tarif retribusi parkir zona yang berlaku di Daerah. Pemungutan retribusi parkir zona sebagaimana sesuai dengan lokasi tertentu dan dapat dilakukan melalui sistem

elektronik dan/atau non elektronik. Pemungutan melalui sistem elektronik sesuai dengan tariff yang sudah di tentukan dan dilaksanakan menggunakan alat parkir meter dan/atau sejenisnya. Pemerintah Daerah dapat menunjuk Bank Umum sebagai tempat pembayaran retribusi dalam pelaksanaan pemungutan retribusi parkir zona melalui sistem elektronik. Petugas parkir yang bertugas pada lokasi parkir zona yang menggunakan alat parkir meter dan/atau sejenisnya diberikan honorarium sebesar upah minimum yang berlaku di Daerah.

2.2.6. Parkir Meter

2.2.6.1. Pengertian

Suatu alat yang digunakan untuk mengukur waktu lama parkir dan menerima pembayaran uang parkir. Dengan adanya parkir meter, pengemudi dapat memarkirkan kendaraan dilokasi yang ditunjuk sebagai tempat parkir. Parkir meter umumnya dipakai Pemerintah kota atau otoritas parkir di bahu jalan yang menjadi lokasi parkir.

2.2.6.2. Keuntungan Parkir Meter

1. Pembayaran retribusi parkir sesuai demham waktu parkir, sehingga memenuhi azas keadilan (setelah diberlakukan tariff progresif)
2. Juru parkir tidak lagi memungut melebihi tariff yang ditentukan

3. Semua transaksi pembayaran parkir akan langsung masuk ke kas daerah, sehingga meminimalisir kebocoran dan terekam di data transaksi bank
4. Memberikan rasa aman kepada juru parkir (karena tidak membawa uang tunai) dan pengguna jasa (karena data kendaraan terekam)
5. Menumbuhkan kepercayaan kepada masyarakat bahwa retribusi yang dibayarkan telah masuk kekas Daerah dan dikembalikan dalam bentuk layanan parkir.
6. Memudahkan pengawasan pendapatan dan kinerja juru parkir dalam memberikan layanan ke pengguna jasa parkir.

2.2.6.3. Cara Menggunakan Parkir Meter

1. Parkir kendaraan ditempat yang telah disediakan
2. Lakukan transaksi parkir pada Terminal parkir meter
3. Pilih tipe kendaraan
4. Masukkan nopol kendaraan
5. Masukkan durasi parkir (setelah diberlakukan tarif progresif)
6. Pastikan data sudah benar dan lakukan konfirmasi
7. Letakkan kartu *e-payment*
8. Mesin akan mencetak struk. Simpan dan tunjukkan struk pada juru parkir saat keluar.

2.2.7. Studi Kelayakan Bisnis

2.2.7.1. Pengertian

Suatu kegiatan yang mempelajari secara mendalam tentang suatu usaha atau bisnis yang akan dijalankan, dalam rangka menentukan layak atau tidak usaha yang dijalankan. Tujuan studi kelayakan bisnis

1. Menghindari resiko kerugian
2. Memudahkan perencanaan
3. Memudahkan pelaksanaan pekerjaan
4. Memudahkan pengawasan
5. Memudahkan pengendalian

Maka untuk menentukan layak atau tidaknya suatu usaha dapat dilihat dari berbagai aspek. Setiap aspek untuk dikatakan layak harus memiliki suatu standar nilai tertentu, sehingga memenuhi kriteria layak dan jika tidak dapat memenuhi kriteria tersebut sebaiknya jangan dijalankan. Aspek-aspek yang dinilai dalam studi kelayakan bisnis meliputi aspek hukum, aspek pasar dan pemasaran, aspek keuangan, aspek teknis/operasional, aspek manajemen dan organisasi, aspek ekonomi dan sosial, serta aspek dampak lingkungan. Dari beberapa aspek tersebut penelitian skripsi ini mengambil aspek keuangan.

2.2.7.2. Aspek- Aspek Penilaian Bisnis

Secara umum, prioritas aspek-aspek yang perlu dilakukan studi kelayakan sebagai berikut:

1. Aspek Hukum

Dalam aspek ini yang akan dibahas adalah masalah kelengkapan dan keabsahan dokumen perusahaan, mulai dari bentuk badan usaha sampai izin-izin yang dimiliki. Kelengkapan dan keabsahan dokumen sangat penting, karena hal ini merupakan dasar hukum yang harus dipegang apabila dikemudian hari timbul masalah. Keabsahan dan kesempurnaan dokumen dapat diperoleh dari pihak-pihak yang menerbitkan atau mengeluarkan dokumen tersebut.

2. Aspek Pasar dan Pemasaran

Untuk menilai apakah perusahaan yang akan melakukan investasi ditinjau dari segi pasar dan pemasaran memiliki peluang pasar yang diinginkan atau tidak. Atau dengan kata lain seberapa besar potensi pasar yang ada untuk produk yang ditawarkan dan seberapa besar market share yang dikuasai oleh para pesaing dewasa ini. Kemudian bagaimana strategi pemasaran yang akan dijalankan, untuk menangkap peluang pasar yang ada, dalam hal ini, untuk menentukan besarnya pasar nyata dan potensi pasar yang ada, maka perlu dilakukan riset pasar, baik dengan terjun langsung ke lapangan maupun dengan mengumpulkan data dari berbagai

sumber. Kemudian, setelah diketahui pasar nyata dan potensi pasar yang ada barulah disusun strategi pemasarannya.

3. Aspek Keuangan

Penelitian dalam aspek ini dilakukan untuk menilai biaya-biaya apa saja yang akan dikeluarkan dan seberapa besar biaya-biaya yang akan dikeluarkan. Kemudian juga meneliti seberapa besar pendapatan yang akan diterima jika proyek jadi dijalankan. Penelitian ini meliputi seberapa lama investasi yang ditanamkan akan kembali. Kemudian darimana saja sumber pembiayaan bisnis tersebut dan bagaimana tingkat suku bunga yang berlaku, sehingga apabila dihitung dengan formula penilai investasi sangat menguntungkan. Metode penilaian yang akan digunakan nantinya dengan Payback period, Net Present Value, Internal Rate of Return, Profitability Index, Break Event Point serta dengan rasio-rasio keuangan lainnya.

4. Aspek Teknis/Operasi

Dalam aspek ini yang akan diteliti adalah mengenai lokasi usaha, baik kantor pusat, cabang, pabrik, atau gudang. Kemudian penentuan layout gedung, mesin, dan peralatan serta layout ruangan sampai kepada usaha perluasan selanjutnya. Penelitian mengenai lokasi meliputi berbagai pertimbangan, apakah harus dekat dengan pasar, dekat dengan bahan baku, dengan tenaga kerja, dengan pemerintahan, lembaga keuangan, pelabuhan, atau

pertimbangan lainnya. Kemudian mengenai penggunaan teknologi apakah padat karya atau padat modal. Artinya jika menggunakan padat karya, maka akan memberikan kesempatan kerja, namun padat karya justru sebaliknya.

5. Aspek Manajemen/Organisasi

Yang dinilai dalam aspek ini adalah para pengelola usaha dan struktur organisasi yang ada. Proyek yang dijalankan akan berhasil apabila dijalankan oleh orang-orang yang profesional, mulai dari merencanakan, melaksanakan, sampai dengan mengendalikannya apabila terjadi penyimpangan. Demikian pula dengan struktur organisasi yang dipilih harus sesuai dengan bentuk dan tujuan usahanya.

6. Aspek Ekonomi Sosial

Penelitian dalam aspek ekonomis adalah untuk melihat seberapa besar pengaruh yang ditimbulkan jika proyek ini dijalankan. Pengaruh ini terutama terhadap ekonomi secara luas serta dampak sosialnya terhadap masyarakat secara keseluruhan. Dampak ekonomi tertentu, peningkatan pendapatan masyarakat baik yang bekerja di pabrik atau masyarakat diluar lokasi pabrik. Demikian pula dengan dampak sosial yang ada seperti tersedianya sarana dan prasarana seperti jalan, jembatan, penerangan, telpon, air, tempat kesehatan, pendidikan, sarana olahraga, sarana ibadah.

7. Aspek Dampak Lingkungan

Merupakan analisis yang paling dibutuhkan pada saat ini, karena setiap proyek yang dijalankan akan sangat besar dampaknya terhadap lingkungan disekitarnya, baik terhadap darat, air, dan udara, yang pada akhirnya akan berdampak terhadap kehidupan manusia, binatang, dan tumbuh-tumbuhan yang ada disekitarnya.

2.2.6.3. Aspek Keuangan

Investasi yang dilakukan dalam berbagai bidang bisnis (usaha), sudah barang tentu memerlukan sejumlah modal (uang), disamping keahlian lainnya. Modal yang digunakan untuk membiayai suatu bisnis, mulai dari biaya prainvestasi, biaya investasi dalam aktiva tetap, hingga modal kerja. Untuk pertama kali modal digunakan untuk membiayai biaya prainvestasi dan seperti pengurusan izin-izin dan pembuatan studi usaha. Kemudian selanjutnya yang harus dikeluarkan adalah untuk pembelian aktiva tetap seperti pembelian tanah, pendirian bangunan atau gedung, pembelian mesin – mesin, dan aktiva tetap lainnya.

Dalam membuat estimasi pendapatan yang akan diperoleh dimasa yang akan datang perlu dilakukan perhitungan secara cermat dengan membandingkan data dan informasi yang ada sebelumnya. Begitu juga dengan estimasi biaya-biaya yang akan dikeluarkan selama periode tertentu, termasuk jenis-jenis biaya yang akan dikeluarkan perlu diperinci serinci mungkin. Semua ini

tentunya menggunakan asumsi-asumsi tertentu yang akhirnya akan dituangkan dalam aliran kas (Cash Flow) perusahaan selama periode usaha. Dengan dibuatnya aliran kas perusahaan, kemudian dinilai kelayakan investasi tersebut melalui kriteria kelayakan investasi. Tujuannya adalah untuk menilai apakah investasi ini layak atau tidak dijalankan dilihat dari aspek keuangan.

2.2.7.4. Biaya Kebutuhan Investasi

Investasi dilakukan dalam berbagai bentuk dan digunakan untuk membeli aset-aset yang dibutuhkan usaha tersebut. Aset-aset tersebut biasanya berupa aset tetap yang dibutuhkan perusahaan mulai dari pendirian sampai dapat dioperasikan. Oleh karena itu, sebelum melakukan investasi kita harus membuat lebih dahulu biaya kebutuhan investasi. Kebutuhan investasi yang digunakan untuk membeli berbagai kebutuhan yang berkaitan dengan investasi tersebut.

Komponen yang terkandung dalam biaya kebutuhan investasi biasanya disesuaikan dengan jenis usaha yang dijalankan. Secara garis besar biaya kebutuhan investasi meliputi:

1. Biaya prainvestasi
 - a. Biaya pembuatan study
 - b. Biaya pengurusan izin-izin
2. Biaya aktiva tetap
 - a. Aktiva tetap berwujud

- 1) Tanah
 - 2) Mesin-mesin
 - 3) Bangunan
 - 4) Peralatan
 - 5) Inventaris kantor
 - 6) Aktiva berwujud lainnya
- b. Aktiva tetap tidak berwujud
- 1) Good will
 - 2) Hak cipta
 - 3) Lisensi
 - 4) Merek dagang
3. Biaya operasional
- a. Upah dan gaji karyawan
 - b. Biaya listrik
 - c. Biaya telpon dan air
 - d. Biaya pemeliharaan
 - e. Pajak
 - f. Premi asuransi
 - g. Biaya pemasaran
 - h. Biaya-biaya lainnya

Sumber pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan investasi dapat digunakan modal sendiri atau modal pinjaman atau kombinasi dari keduanya. Pembiayaan untuk membeli aktiva tetap

biasanya bersumber dari pinjaman jangka panjang. Hal disebabkan aktiva tetap digunakan dalam jangka waktu relatif panjang pula, sehingga pengembalian pinjamannya pun dapat dilakukan secara jangka panjang. Adapun untuk biaya operasional biasanya digunakan pinjaman jangka pendek.

2.2.7.5. Arus Kas (Cash Flow)

Cash flow merupakan arus kas atau aliran kas yang ada diperusahaan dalam suatu periode tertentu. Cash flow menggambarkan berupa uang masuk ke perusahaan dan jenis-jenis pemasukan dan juga menggambarkan berupa uang yang keluar serta jenis biaya-biaya yang dikeluarkan. Uang masuk dapat berupa pinjaman dari lembaga keuangan maupun hibah dari pihak tertentu juga bisa diperoleh dari penghasilan atau pendapatan yang diperoleh dari usaha yang sedang dijalankan maupun dari usaha lainnya yang bukan dari usaha utama. Uang keluar merupakan sejumlah uang yang dikeluarkan perusahaan dalam suatu periode, baik yang langsung berhubungan dengan usaha yang dijalankan maupun yang tidak ada hubungan sama sekali dengan usaha utama. Uang keluar ini merupakan biaya-biaya yang harus dikeluarkan perusahaan untuk kegiatan operasional perusahaan. Estimasi pendapatan dan biaya merupakan perkiraan berapa pendapatan yang akan diperoleh dan berapa besarnya biaya yang harus dikeluarkan dalam suatu periode. Kemudian jenis-jenis pendapatan

dan biaya apa saja yang dikeluarkan serta berapa besar pendapatan yang diperoleh dan biaya yang dikeluarkan setiap pos. Pada akhirnya cash flow akan terlihat pada kas akhir yang diterima perusahaan. Jadi arus kas adalah *jumlah uang yang masuk dan keluar dalam suatu perusahaan mulai dari investasi dilakukan sampai dengan berakhirnya investasi tersebut*. Dalam hal ini, bagi investor yang terpenting adalah berapa kas bersih yang diterima dari uang yang diinvestasikan disuatu usaha. Pentingnya kas akhir bagi investor jika dibandingkan dengan laba yang diterima perusahaan dikarenakan:

1. Kas diperlukan untuk memenuhi kebutuhan uang tunai sehari-hari
2. Kas digunakan untuk membayar semua kewajiban yang jatuh tempo
3. Kas juga digunakan untuk melakukan investasi kembali

Jenis-jenis cash flow yang dikaitkan dengan suatu usaha terdiri dari:

1. Initial cash flow atau lebih dikenal kas awal yang merupakan pengeluaran pada awal periode untuk investasi.
2. Operasional cash flow merupakan kas yang diterima atau dikeluarkan pada saat operasi usaha, seperti penghasilan yang diterima dan pengeluaran yang dikeluarkan pada suatu periode.

3. Terminal cash flow merupakan uang kas yang diterima pada saat usaha tersebut berakhir.

2.2.7.6. Kriteria Penilaian Investasi

Seperti sudah dijelaskan sebelumnya bahwa untuk menentukan layak tidaknya suatu investasi ditinjau dari aspek keuangan perlu dilakukan dapat diukur dengan beberapa kriteria. Setiap penilaian layak diberikan nilai yang standar untuk usaha yang sejenis dengan cara membandingkan dengan rata-rata industri atau target yang telah ditentukan. Dalam praktiknya ada beberapa kriteria untuk menentukan apakah suatu usaha layak atau tidak untuk dijalankan ditinjau dari aspek keuangan. Setiap metode yang digunakan memiliki kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Dalam penilaian suatu usaha hendaknya penilai menggunakan beberapa metode sekaligus. Artinya, semakin banyak metode yang digunakan, maka semakin memberikan gambaran yang lengkap sehingga diharapkan memberikan hasil yang akan diperoleh menjadi lebih sempurna.

Adapun kriteria yang biasa digunakan untuk memenuhi kelayakan suatu usaha atau investasi adalah :

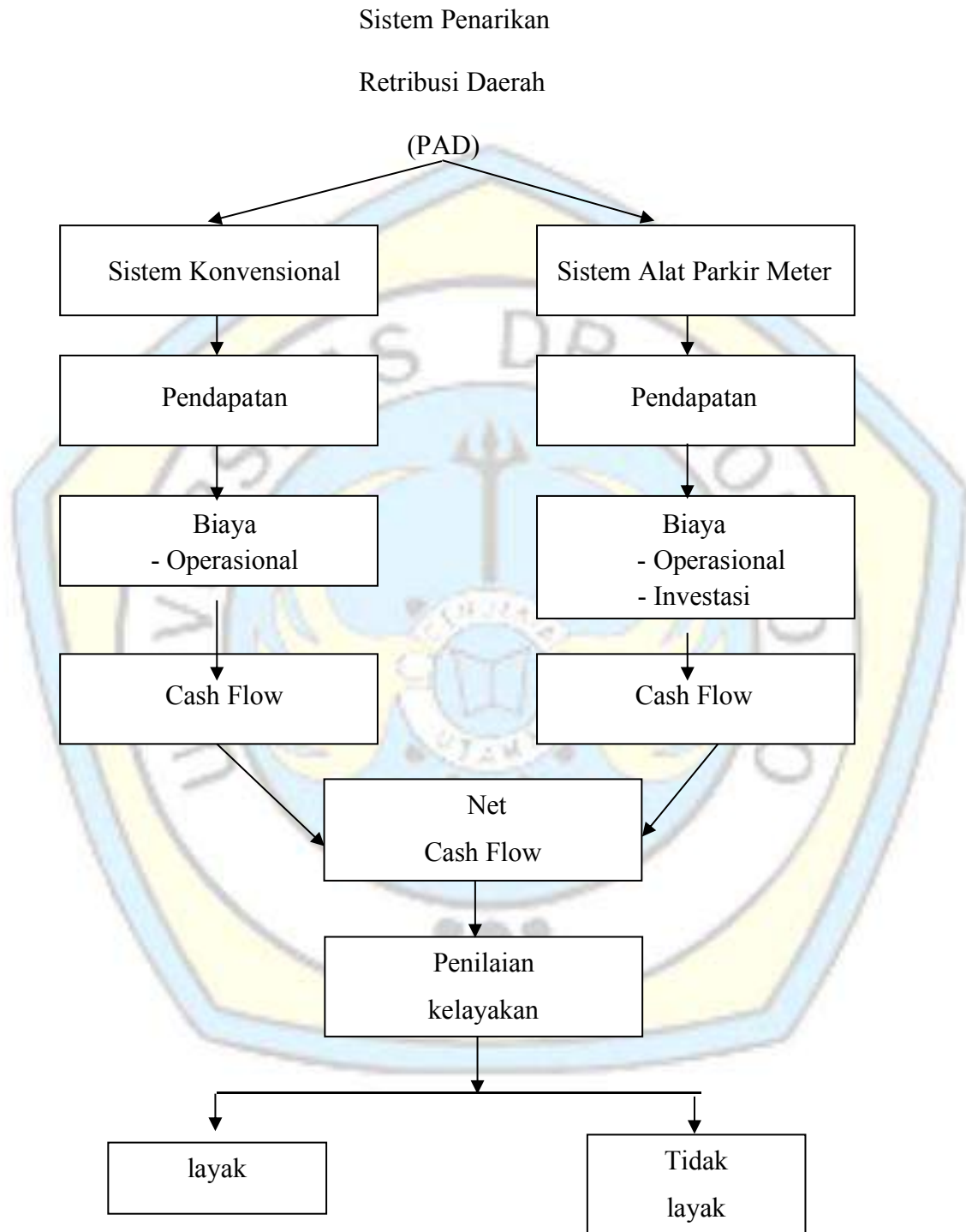
1. Payback period (PP)
2. Average Rate of Return (ARR)
3. Net Present Value (NPV)

4. Internal Rate of Return (IRR)
5. Profitability Index (PI)
6. Serta berbagai rasio keuangan seperti rasio likuiditas, solvabilitas, aktivitas, dan profibilitas. Penggunaan rasio keuangan ini sebaiknya digunakan atas pemberian pinjaman kepada usaha yang sudah pernah berjalan sebelumnya atau sedang berjalan.



2.3. Kerangka Konseptual

SKEMA KERANGKA KONSEPTUAL



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang akan digunakan adalah tipe penelitian Deskriptif yaitu suatu tipe penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis, aktual dan akurat mengenai data yang ada di lapangan tentang kelayakan sistem dan retribusi daerah yang difokuskan pada pengelolaan retribusi parkir yang ada di kota Surabaya.

Dasar penelitian yang dilakukan ini yaitu melalui pengamatan dan pengkajian untuk memperoleh data tentang berbagai fenomena yang berhubungan dengan pengelolaan retribusi daerah sehingga mendapat data yang obyektif dalam rangka memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah yang menyangkut pengelolaan retribusi parkir yang ada di Surabaya. Metode penelitian ini digunakan karena berdasarkan pada objek penelitian yang membutuhkan pengamatan yang cermat dan mendalam berdasarkan teori-teori dan fakta-fakta yang ada di lapangan.

3.2. Rancangan Penelitian

Rancangan penelitian merupakan proses analisis dan pengumpulan data penelitian yang meliputi proses dari perencanaan serta pelaksanaan penelitian. Rancangan penelitian adalah catatan yang menjelaskan semua prosedur dari penelitian sejak dari judul, latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, hingga analisis data yang kemudian sampai pada penyusunan

hasil penelitian. Pembuatan rancangan penelitian sendiri bertujuan agar penelitian bisa dijalankan dengan lancar.

3.3. Lokasi Penelitian

Lokasi yang dipilih dari penelitian ini adalah kota Surabaya, yang dimana Kota Surabaya adalah kota yang dikenal perkembangannya begitu padat. Selain perkembangannya yang begitu pesat ada berbagai masalah pun tumbuh dan berkembang. Salah satunya masalah pengelolaan dana retribusi parkir.

Adapun fokus penelitian ini ditempatkan di Balai Kota Surabaya yaitu di Jl. Sedap Malam dan Jl. Jimerto yang berada di bawah tanggung jawab Dinas Perhubungan Kota Surabaya

3.4. Definisi operasional, Identifikasi Variabel dan Indikator Variabel

3.4.1. Definisi Operasional

Untuk memberikan suatu pemahaman agar memudahkan penelitian yang akan dilakukan, maka penulis memberikan beberapa batasan penelitian dan fokus penelitian ini yang dioperasionalkan melalui beberapa indikator sebagai berikut :

1. Investasi awal adalah merupakan pengeluaran investasi yang digunakan untuk mendukung sistem parkir meter yang berupa alat parkir meter.
2. Pendapatan adalah merupakan penghasilan yang timbul dari aktivitas parkir tepi jalan umum yang dijaga oleh juru parkir untuk penarikan retribusi parkir yang sudah ditentukan. Ada dua macam pendapatan yaitu :

- a. Pendapatan Sistem parkir konvensional yaitu merupakan pendapatan yang didapat dari aktivitas parkir sebesar 70% dan 30% digunakan sebagai upah juru parkir.
 - b. Pendapatan Sistem parkir meter yaitu merupakan pendapatan yang didapat dari aktivitas parkir tanpa dikurangi dengan upah juru parkir.
3. Biaya adalah aliran dana atau sumber daya yang dihitung dalam satuan moneter yang dikeluarkan guna memenuhi kegiatan operasional atau sering disebut beban yang harus dikeluarkan. Ada dua macam biaya :
- a. Biaya sistem parkir konvensional yaitu biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan operasional yang meliputi karcis parkir.
 - b. Biaya sistem parkir meter yaitu biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan operasional yang meliputi gaji juru parkir, internet, kertas untuk karcis parkir.
4. Cash flow adalah suatu laporan keuangan yang berisikan pengaruh kas dari kegiatan operasi, kegiatan transaksi investasi dan kegiatan transaksi pembiayaan (pendanaan serta kenaikan atau penurunan bersih dalam kas suatu perusahaan selama satu periode.

3.4.2. Identifikasi Variabel

Variabel yang digunakan adalah :

1. Investasi Awal
2. Pendapatan
3. Biaya
4. Cash flow

3.5. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari beberapa dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian guna untuk mendapatkan data sekunder yang akan digunakan dalam menganalisis permasalahan yaitu mengenai konsep teori-teori kebijakan-kebijakan dan pelaksanaannya yang berhubungan dengan pengelolaan retribusi parkir di Surabaya.

3.6. Teknik Pengumpulan Data

3.6.1. Teknik Observasi

Merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses pengamatan dan ingatan (Sugiyono 2013:145)

3.6.2. Teknik Dokumenter

Merupakan teknik pengumpulan data dengan menggunakan data melalui arsip atau dokumen yang sudah dikelola oleh Dinas Perhubungan kota Surabaya.

3.7. Teknik Analisis

3.7.1. Perhitungan Pendapatan dengan Sistem Konvensional

$$\text{Pendapatan} = \text{Volume kendaraan} \times \text{Tarif}$$

Pendapatan Rp. xx

Upah Jukir (30% x Pendapatan) (Rp. xx)

Rp. xx

Biaya Operasional (Rp. xx)

Pendapatan Bersih Rp. xx

3.7.2. Perhitungan Pendapatan dengan Sistem Alat Parkir Meter

Pendapatan = Volume kendaraan x Tarif

Pendapatan Rp. xx

Biaya

Upah Jukir Rp. xx

Biaya operasional Rp. xx

Total Biaya (Rp. xx)

Pendapatan bersih Rp. xx

3.7.3. Menghitung Selisih pendapatan sistem parkir konvensional dengan sistem parkir meter

1. Rumus Net Cash Flow

Pendapatan Sistem Parkir Meter Rp. xx

Biaya Sistem parkir meter

Upah jukir Rp. xx

Biaya operasional Rp. xx

Total biaya (Rp. xx)

Pendapatan Rp. xx

Pendapatan Sistem Parkir Konvensional (Rp. xx)

Biaya Sistem Parkir Konvensional

Upah jukir (30% x Pendapatan) (Rp. xx)

Biaya Operasional (Rp. xx)

Net Cash Flow Rp. xx

3.7.4. Membandingkan Proyeksi Net Cash Flow dengan Investasi

1. Rumus untuk mencari nilai investasi :

$$\text{Investasi} = \text{Jumlah Alat} * \text{Harga}$$

2. Mencari perbandingan NCF dengan Investasi

$$\text{Investasi Awal} - \sum \text{Net Cash Flow}$$

3.7.5. Perhitungan Penilaian Kelayakan Investasi

3.7.5.1. Payback Periode (PP)

Merupakan teknik penilaian terhadap jangka waktu (periode) pengembalian investari suatu proyek atau usaha

Rumus Menghitung PP =

$$\text{PP} = \frac{\text{Investasi}}{\text{Kas bersih / tahun}} \times 1 \text{ Tahun}$$

3.7.5.2. Net Present Value (NPV)

Merupakan pembandingan antara PV kas bersih (PV of Proceed) dan PV Investasi (Capital Otulays) selama umur investasi. Selisih antara nilai kedua PV tersebut yang kita kenal dengan Net Present Value (NPV)

Rumus mencari NPV =

$$\text{NPV} = \frac{\text{Kas bersih 1}}{(1 + r)} + \frac{\text{Kas bersih 2}}{(1 + r)^2} + \frac{\text{Kas bersih N}}{(1 - r)^n} - \text{Investasi}$$

Keterangan :

1. NPV Positif, maka investasi diterima
2. NPV Negatif, maka investasi ditolak

3.7.5.3. Internal Rate of Return (IRR)

Merupakan alat untuk mengukur tingkat pengembalian hasil intern.

Rumus mencari IRR =

$$IRR = i_1 + \frac{NPV_1}{NPV_1 - NPV_2} \times (i_2 - i_1)$$

Dimana :

i_1 = tingkat bunga 1 (tingkat discount rate yang menghasilkan NPV_1)

i_2 = tingkat bunga 2 (tingkat discount rate yang menghasilkan NPV_2)

NPV_1 = Net Present Value 1

NPV_2 = Net Present Value 2

3.7.5.4. Profitability Index (PI)

Merupakan rasio aktivitas dari jumlah nilai sekarang penerimaan bersih dengan nilai sekarang pengeluaran investasi selama umur investasi.

Rumus mencari PI

$$PI =$$

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Objek Penelitian

4.1.1. Sejarah Dinas Perhubungan Kota Surabaya

Dinas Perhubungan kota Surabaya merupakan penggabungan dari tiga dinas yang ada pada masa sebelum Otonomi Daerah yaitu LLAJ (Lalu Lintas Angkutan Jalan Daerah), Dinas Terminal, dan Dinas Parkir. Dengan adanya Otonomi Daerah sesuai dengan UU No. 22 Tahun 1999 dan pp No.25 Tahun 2000 maka dibentuklah Dinas Perhubungan kota Surabaya yang merupakan penggabungan dari tiga Dinas yakni Dinas LLAJ, Dinas Terminal, Dinas Parkir. Struktur organisasi Dinas Perhubungan kota Surabaya awalnya telah diatur sesuai dengan PERDA kota Surabaya No.3 Tahun 2001 Tentang organisasi Dinas kota Surabaya, yang untuk saat ini diganti dengan PERDA No.8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Tugas pokok dan Fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Perhubungan kota Surabaya berdasarkan peraturan Walikota Surabaya Nomor 91 Tahun 2008 yakni bertugas melaksanakan sebagian urusan pemerintahan dalam bidang perhubungan, lingkungan hidup, otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persediaan. Fungsi dari Dinas Perhubungan dalam menyelenggarakan tugas yakni merumuskan kebijakan teknis dibidang perhubungan, menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum, melakukan pembinaan dan melaksanakan tugas yang telah diamanahkan, mengelola

ketatausahaan dinas, serta melaksanakan tugas lain yang telah diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Selain memiliki tugas dan fungsi yang telah diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 91 tahun 2008, Dinas Perhubungan kota Surabaya juga memiliki Visi dan Misi. Dinama Visi dari Dinas Perhubungan kota Surabaya adalah terwujudnya transportasi yang berkualitas yaitu mengandung pengertian bahwa transportasi diselenggarakan dengan handal, efisien, terjangkau, mengutamakan keselamatan pengguna jasa transportasi dan menekan tingkat kecelakaan seminimal mungkin. Sedangkan misi Dinas Perhubungan kota Surabaya yakni mengembangkan sistem transportasi perkotaan yang terintegrasi di wilayah kota Surabaya dengan meningkatkan kerjasama antar Daerah dibidang transportasi. Serta meningkatkan kualitas pelayanan dan penerimaan pendapatan asli daerah di sektor transportasi.

4.1.2. Struktur Organisasi dan Tata Kerja UPTD Parkir Dinas Perhubungan Kota Surabaya

Berdasarkan peraturan Walikota Surabaya Nomor 68 Tahun 2008 tentang Unit pelaksana Teknik Dinas Parkir atau disingkat UPTD maka dibentuklah struktur organisasi UPTD Parkir kota Surabaya adalah sebagai berikut : UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang dalam melaksanakan tugasnya UPTD mempunyai fungsi:

1. Pelaksanaan penyusunan program kegiatan pengelolaan perparkiran
2. Pelaksanaan pemungutan retribusi parkir

3. Penyiapan bahan penetapan lokasi tempat parkir serta memproses permohonan perizinan penyelenggaraan parkir di tepi jalan umum
4. Pelaksanaan pengolaan, penataan dan pemeliharaan sarana prasarana pendukung penyelenggaraan perparkiran
5. Pelaksanaan penertiban, pengawasan, dan pengamanan tempat parkir
6. Pelaksanaan ketatausahaan UPTD
7. Pelaksanaan penerimaan dan penyetoran retribusi parkir ke Rekening kas Umum Daerah
8. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas, serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Unit pelaksanaan teknis Dinas Parkir pada Dinas Perhubungan Kota Surabaya terdiri dari 2 UPTD yaitu :

1. UPTD Parkir Tempat Khusus
2. UPTD Parkir Tepi Jalan Umum

Kepala UPTD yang mempunyai Tugas pokok:

1. Membantu Kepala Dinas Perhubungan dalam melakukan urusan pengelolaan perparkiran
2. Berkewajiban memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan aparat pelaksanaan dan staf UPTD
3. Berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan UPTD maupun instansi lain yang terkait.

Sub Bagian Tata Usaha Bertugas :

1. Menyusun perencanaan dan kegiatan UPTD
2. Melaksanakan urusan keuangan
3. Melaksanakan administrasi kepegawaian
4. Melaksanakan pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan
5. Melaksanakan penerimaan dan penyetoran retribusi parkir ke rekening kas umum Daerah
6. Serta melaksanakan koordinasi penyusunan laporan

Sub unit Parkir Tepi Jalan Umum bertugas :

1. Melaksanakan pengelolaan tempat parkir di tepi jalan umum
2. Melaksanakan pengamanan, pengawasan, dan ketertiban terhadap kendaraan yang diparkir
3. Melaksanakan pengaturan kelancaran lalu lintas disekitar lokasi tempat parkir
4. Melaksanakan pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum

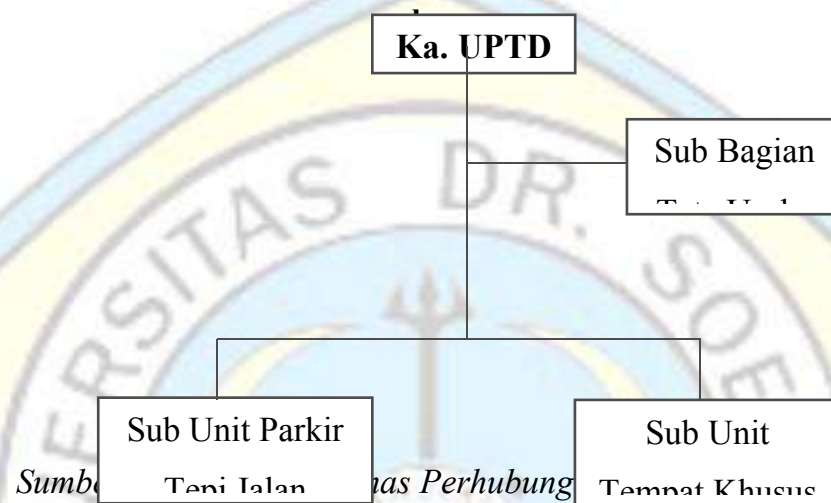
Sub unit Parkir Tempat Khusus bertugas :

1. Melaksanakan koordinasi dengan instansi tempat khusus parkir dan para pengelola parkir
2. Melaksanakan pemungutan retribusi parkir
3. Melaksanakan pengaturan kelancaran lalu lintas di sekitar lokasi tempat khusus parkir dan/atau parkir swasta
4. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya

Dari penjelasan masing-masing dapat diilustrasikan susunan organisasi UPTD parkir Dinas Perhubungan Kota Surabaya pada bagan berikut ini :

Susunan Organisasi UPTD Parkir Dinas Perhubungan Kota

Surabaya



Dari bagan susunan organisasi UPTD parkir Dinas Perhubungan Kota Surabaya dapat diuraikan lagi jumlah petugas pada tabel 3.1 sebagai berikut :

Tabel 4.1
Tabel rekapitulasi Data Uraian Pekerjaan Pegawai Kantor UPTD
Parkir Dinas Perhubungan Kota Surabaya

No	Nama Jabatan	Jumlah Pegawai
1	Kepala UPTD	2
2	Kasubag Tata Usaha	2
3	Teknis 3	6
4	Teknis 4	7
5	Operasional	20
6	Administrasi	14
Jumlah		50

Sumber : Data UPTD Dinas Perhubungan Kota Surabaya

4.1.3. Gambaran Umum Titik Parkir Tepi Jalan Umum Di Wilayah Kota Surabaya

Terdapat 31 Kecamatan yang ada di kota Surabaya. Wilayah Surabaya Utara menaungi 11 kecamatan, untuk wilayah Surabaya Timur menaungi 11 kecamatan, dan untuk wilayah Surabaya Selatan menaungi 9 kecamatan. Jumlah titik parkir/lokasi parkir, UPTD Parkir Tepi Jalan Umum dapat dilihat pada tabel 3.2 berikut :

Tabel 4.2
Jumlah Parkir/Lokasi di Tepi Jalan Umum

No	Uraian	Utara	Timur	Selatan	Jumlah
1	Parkir Tepi Jalan Umum	384 titik	539 titik	570 titik	1.493 titik
2	Koordinator Juru Parkir	11 orang	11 orang	19 orang	41 orang
3	Juru Parkir	408 orang	462 orang	707 orang	1.578 orang

Sumber Data : Dinas Perhubungan Kota Surabaya

Dari tabel 3.2 dapat diketahui jumlah lokasi titik parkir tepi jalan umum Kota Surabaya dalam 3 wilayah, dengan rincian Wilayah Utara 384 titik, Timur 539 titik dan Selatan 570 titik. Jumlah parkir/lokasi secara keseluruhan adalah 1.493 titik.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya menunjuk koordinator juru parkir untuk bertugas mengkoordinir beberapa juru parkir sesuai dengan wilayah kerja yang telah ditentukan yakni mendistribusikan karcis parkir serta mengambil setoran dari juru parkir. Jumlah koordinator juru parkir 41 orang.

Sedangkan juru parkir yang ada di kota Surabaya khususnya untuk wilayah UPTD parkir tepi jalan umum adalah 1.578 orang yang tersebar dalam Seluruh wilayah Utara 408 orang, Timur 462 orang, dan Selatan 708 Orang. Untuk objek retribusi parkir tepi jalan umum adalah penyedia jasa pelayanan parkir bagi kendaraan angkitan orang dan barang yang memanfaatkan parkir tepi jalan umum. Sedangkan subjek retribusi parkir tepi jalan umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan dan menikmati jasa pelayanan parkir di tepi jalan umum.

4.1.4. Ketentuan Karcis Parkir Hologram Berhadiah Dinas Perhubungan Kota Surabaya

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Nomor 1 Tahun 2009 tentang penyelenggaraan perparkiran dan retribusi parkir dalam pasal 11 adalah sebagai berikut :

1. Pengadaan karcis parkir pada tempat parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan dan wajib diporporasi
2. Pengadaan karcis parkir pada tempat parkir yang diselenggarakan oleh orang atau badan dilaksanakan oleh orang atau badan yang bersangkutan
3. Karcis parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib diporporasi oleh Pemerintah Daerah, kecuali bagi tempat parkir yang menggunakan mesin parkir
4. Percetakan karcis parkir wajib memenuhi standar teknis pengamanan

5. Ketentuan lebih lanjut mengenai standar teknis pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diatur dengan peraturan Kepala Daerah

Karcis parkir adalah tanda bukti pembayaran atas pemakaian tempat parkir kepada setiap kendaraan. Pada karcis parkir harus memuat data sebagai berikut :

1. Nomor seri
2. Nama jenis pungutan
3. Dasar hukum pungutan/izin penyelenggaraan parkir
4. Nomor urut karcis parkir
5. Besarnya retribusi/sewa
6. Waktu masuk dan keluarnya kendaraan
7. Nomor polisi kendaraan
8. Asuransi
9. Hari, tanggal dan bulan
10. Nomor telepon pengaduan

Karena untuk mengantisipasi pemalsuan karcis parkir Dinas Perhubungan Kota Surabaya dengan inovasinya karcis parkir baru hologram berpengaman dapat dijadikan bukti sah pengguna jasa parkir tidak mudah dipalsukan. Dibalik hologram karcis tersebut tertera tulisan hadiah yang dapat diperoleh, akan tetapi tidak setiap karcis yang berhologram berhadiah. Berikut gambar desain karcis parkir tepi jalan umum hologram berhadiah untuk kendaraan roda 2 :

Keterangan dari gambar desain karcis parkir hologram berhadiah diatas telah memenuhi kriteria dari Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2009. Dilengkapi dengan nomor seri karcis, tanggal masuk kendaraan, nomor kendaraan, jam masuk kendaraan, dan jam keluar. Sedangkan bagian belakag karcis terdapat keterangan Tempat pengambilan hadiah dan pengaduan: Dinas Perhubungan Kota Surabaya jalan Dukuh menanggal no 1 Surabaya. Segala barang yang ada didalam kendaraan anda adalah tanggung jawab anda, dan pengelola parkir tidak bertanggung jawab apabila terjadi kehilangan barang pada kendaraan anda. Pajak hadiah ditanggung oleh pengguna jasa parkir.

4.2. Data Realisasi Jumlah Kendaraan Parkir

4.2.1. Jumlah Kendaraan Parkir Konvensional

4.2.1.1 Volume Kendaraan Parkir Konvensional

Data realisasi jumlah kendaraan adalah jumlah volume kendaraan yang parkir, baik pada pada parkir konvesional maupun parkir meter. Adapun volume kendaraan pada parkir konvensional dilihat dari volume kendaraan pada Tahun 2012 sampai 2016, baik kendaraan roda 2 maupun kendaraan roda 4, setelah di ketahui jumlah volume kendaraan maka dilakukan penghitungan total kendaraan dan dihitung rata – rata kenaikan volume kendaraan per tahun. Hasil penghitungan pada penelitian ini ialah sebagai berikut :

Tabel 4.3

Volume Kendaraan Parkir Konvensional

No	Periode	Jumlah Kendaraan		Rata - rata Volume
		Roda 2	Roda 4	
1	2012	114,121	72,629	15,563
2	2013	115,031	74,578	15,801
3	2014	115,970	76,561	16,044
4	2015	115,031	74,578	15,801
5	2016	116,031	76,607	16,053

Sumber : Dinas Perhubungan kota Surabaya

Berdasarkan data di atas maka dapat diketahui jumlah kendaraan pada parkir konvensional pada Tahun 2012 sampai dengan 2016 mengalami kenaikan yang fluktuatif dan rata-rata kenaikan sebesar 1,5%. Total jumlah kendaraan dapat dilihat bahwa jumlah kendaraan roda 2 lebih banyak di bandingkan kendaraan roda 4 yakni jumlah roda 2 yakni 576.184 kendaraan dan roda 4 yakni 374.953 kendaraan.

4.2.1.2 Tarif Parkir Konvensional

Setelah mengetahui volume kendaraan pada parkir konvensional maka tahap selanjutnya adalah penghitungan pendapatan. Penghitungan pendapatan ini dilakukan dengan mengalikan volume kendaraan dengan tarif parkir yang telah ditetapkan. Adapun hasil penghitungan pendapatan pada parkir konvensional adalah sebagai berikut :

Tabel 4.4**Tarif Parkir Konvensional**

No	Periode	Tarif Parkir Roda 2			Tarif Parkir Roda 4			Total Pendapatan
		Jumlah	Tarif	Total	Jumlah	Tarif	Total	
1	2012	114.121	500	57.060.500	72.629	1.500	108.943.500	166.004.000
2	2013	115.031	500	57.515.500	74.578	1.500	111.867.000	169.382.500
3	2014	115.970	500	57.985.000	76.561	1.500	114.841.500	172.826.500
4	2015	115.031	1.000	115.031.000	74.578	3.000	223.734.000	338.765.000
5	2016	116.031	1.000	116.031.000	76.607	3.000	229.821.000	345.852.000

Sumber : Data yang diolah

Berdasarkan data di atas maka dapat diketahui tarif parkir sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya nomor 8 Tahun 2012 tentang retribusi pelayanan parkir di Tepi Jalan Umum, untuk roda 2 adalah Rp. 500 dan untuk roda 4 adalah Rp 1.500. Hingga tahun 2014 masih menggunakan Peraturan daerah yang sama. sedangkan tarif kendaraan pada tahun 2015 – 2016 ada peraturan baru yaitu peraturan Walikota Surabaya nomor 36 tahun 2015 tentang perubahan tarif retribusi pelayanan parkir di Tepi Jalan Umum, untuk roda 2 adalah Rp 1.000 dan roda 4 adalah Rp 3.000.

4.2.2 Biaya Operasional Parkiran Konvensional

4.2.2.1 Daftar Nama Juru Parkir Pada Sistem Konvensional

Pada parkir konvensional, kegiatan operasional parkir ditangani oleh juru parkir utama. Total juru parkir utama dan pembantu pada parkir konvensional ialah 33 karyawan dengan masing-masing gaji yang diatur oleh juru parkir utama. Berikut ini adalah nama karyawan parkir konvensional sebagai berikut :

Tabel 4.5
Daftar Nama Juu Parkir Pada Sistem Konvensional

Nama Juru Parkir Utama	Nama Juru Parkir Pembantu
1. Kaderi	2. Imam
	3. Sahrul
4. Djamaluddin	5. Misturi
	6. Mat hori
	7. Nawafi
8. Amari	9. Koiri
10. Fahhad	11. Iham
	12. Sumairah
13. Khoirul	
14. Rini	
15. Yahya	16. Cece
17. H Nur	18. Khoirul
19. Sahri	20. Syamsul
	21. Djamal
	22. Timin
	23. Inayah
24. Subaidi	
25. Djunaidi	
26. Slamet	
27. Musa	28. Rofi'I
	29. Abd Majid
	30. Hasid
	31. Nurudin
32. Buari	33. Samsuri

Sumber : Dinas Perhubungan kota Surabaya

Berdasarkan data di atas maka dapat diketahui bahwa total karyawan pada parkir meter ialah 14 juru parkir utama dan 19 Juru parkir pembantu.

4.2.2.2 Biaya Gaji Jukir Konvensional

Selain menghitung volume kendaraan dan pendapatan, tahap selanjutnya adalah menghitung biaya operasional parkir konvensional. Adapun biaya operasional pada parkir konvensional adalah biaya gaji. Biaya gaji dihitung 30% dari total pendapatan setiap tahunnya. Adapun biaya operasional pada parkir konvensional ini adalah sebagai berikut :

Tabel 4.6
Biaya Operasional

No	Periode	Pendapatan	Gaji Jukir (30% x Pendapatan)
1	2012	166,004,000	49,801,200
2	2013	169,382,500	50,814,750
3	2014	172,826,500	51,847,950
4	2015	338,765,000	101,629,500
5	2016	345,852,000	103,755,600

Sumber : Data yang diolah

Berdasarkan tabel 4.5 di atas maka dapat dijelaskan bahwa total biaya gaji jukir tahun 2012 – 2016 ialah tahun 2012 sebesar Rp. 49.801.200, pada tahun 2013 sebesar Rp 50.814.750, pada tahun 2014 sebesar Rp 51.847.950 pada tahun 2015 sebesar Rp 101.629.500 dan pada tahun 2016 sebesar Rp 103.755.600.

4.2.3 Jumlah Kendaraan Parkir Meter

4.2.3.1 Volume Kendaraan Parkir Meter

Volume kendaraan parkir meter ialah jumlah kendaraan parkir meter pada tahun 2017 baik untuk roda 2 maupun roda 4, adapun volume kendaraan pada parkir meter pada Tahun 2017 ialah sebagai berikut ini :

Tabel 4.7

Jumlah Kendaraan Parkir Meter

No	Periode	Jumlah Kendaraan		Jumlah
		Roda 2	Roda 4	
1	2017	166.552	100.510	267.062
Jumlah		166.552	100.510	267.062
Rata - rata Per Tahun		13.879	8.376	22.255

Sumber : Dinas Perhubungan kota Surabaya

Tabel di atas menjelaskan jumlah kendaraan pada parkir meter pada tahun 2017 dimulai dari bulan februari hingga bulan desember, maka untuk roda 2 jumlah kendaraannya ialah 166.552 kendaraan dan untuk roda 4 jumlah kendaraannya ialah 100.510 kendaraan. Rata – rata jumlah kendaraan per tahun ialah 13.879 untuk roda 2 dan 8.376 untuk roda 4.

4.2.3.2 Tarif Kendaraan Parkir Meter

Setelah mengetahui volume kendaraan pada parkir meter maka tahap selanjutnya adalah penghitungan pendapatan. Penghitungan pendapatan ini dilakukan dengan mengalikan volume kendaraan dengan tarif parkir yang telah ditetapkan. Adapun hasil penghitungan pendapatan pada parkir meter adalah sebagai berikut :

Tabel 4.8
Tarif Parkir Meter

No	Periode	Tarif Parkir 2017		Total Pendapatan
		Jumlah	Tarif	
1	Tarif Roda 2	166,552	2,000	333,104,000
2	Tarif Roda 4	100,510	5,000	502,550,000

Sumber : Data yang diolah

Tabel di atas menjelaskan tarif parkir pada system parkir meter ini sesuai dengan peraturan Walikota Surabaya nomor 3 tahun 2017 tentang pedoman penerapan parkir Zona di Kota Surabaya, untuk roda 2 tarifnya ialah Rp 2.000 dan roda 4 ialah Rp 5.000, sehingga dapat diketahui total pendapatan parkir meter pada tahun 2017.

4.2.4 Biaya Operasional Parkir Meter

4.2.4.1 Daftar Nama Jukir dan Gaji Jukir Parkir Meter

Pada parkir meter, kegiatan operasional parkir ditangani oleh beberapa karyawan. Total karyawan pada parkir meter ialah 22 karyawan dengan masing – masing gaji pokok setiap karyawan ialah Rp. 2.000.000. Berikut ini adalah nama karyawan parkir meter sebagai berikut :

Tabel 4.9

Biaya Gaji Parkir Pada Sistem Alat Parkir Meter

No	Nama Karyawan	Gaji / Upah
1	Kadri	Rp 2.000.000
2	Imam	Rp 2.000.000
3	Syahrul	Rp 2.000.000
4	Junaidi	Rp 2.000.000

No	Nama Karyawan	Gaji / Upah
5	Mariyono	Rp 2.000.000
6	Kairi	Rp 2.000.000
7	Sholica	Rp 2.000.000
8	Sumairah	Rp 2.000.000
9	Ilham	Rp 2.000.000
10	Satimin	Rp 2.000.000
11	Mat Sahri	Rp 2.000.000
12	Jamal	Rp 2.000.000
13	Samsul	Rp 2.000.000
14	Misturi	Rp 2.000.000
15	Mat Hori	Rp 2.000.000
16	Jamaludin	Rp 2.000.000
17	Nawafi	Rp 2.000.000
18	Hasib	Rp 2.000.000
19	Musa	Rp 2.000.000
20	Majid	Rp 2.000.000
21	Sujai	Rp 2.000.000
22	Rofi'i	Rp 2.000.000

Sumber : Data parkir meter

Berdasarkan data di atas maka dapat diketahui bahwa total karyawan pada parkir meter lebih sedikit dari parkir konvensional yaitu 22 karyawan, dengan jumlah gaji pokok masing – masing karyawan adalah Rp 2.000.000.

4.2.4.2 Biaya Operasional

Setelah diketahui biaya gaji yang dikeluarkan dan menghitung volume kendaraan dan pendapatan, tahap selanjutnya adalah menghitung biaya operasional parkir meter. Adapun biaya operasional pada parkir meter adalah biaya gaji, biaya kertas roll dan biaya sim

card. Adapun biaya operasional pada parkir meter ini adalah sebagai berikut

Tabel 4.10
Biaya Operasional Parkir Meteran Tahun 2017

No	Jenis Biaya	Biaya Per Bulan	Total Biaya
1	By. Gaji	44,000,000	528,000,000
2	By. Kertas Roll	3,025,000	36,300,000
3	Sim Card	385,000	4,620,000
Jumlah		47,410,000	568,920,000

Sumber : Data yang diolah

Berdasarkan tabel di atas maka dapat diketahui biaya per bulan yang dikeluarkan untuk parkir meter, antara lain biaya gaji per bulan ialah Rp 44.000.000, biaya kerta roll Rp 3.025.000 dan biaya sim card ialah 385.000 sehingga keseluruhan biaya per bulan parkir meter adalah Rp 47.410.000 dan total keseluruhan per tahun ialah Rp 568.920.000.

4.2.5 Investasi

Invenstasi untuk melakukan kegiatan operasional parkir meter dibutuhkan alat parkir meter, UPS APC dan switch hub hp. Adapun total investasi pada parkir meter ialah sebagai berikut ini :

Tabel 4.11
Investasi Parkir Meter

Sumber: Data yang diolah

Berdasarkan tabel di atas maka dapat dijelaskan bahwa investasi parkir meter terdiri dari alat parkir meter, UPS APC dan switch hub hp dengan total investasi keseluruhan adalah Rp1.253.203.600.

4.2.6 Analisis Data

4.2.6.1 Proyeksi Jumlah Kendaraan Parkir Konvensional

Proyeksi kendaraan parkir konvensional adalah proyeksi volume kendaraan per tahun pada tahun 2017 sampai 2023 di hitung dari rata – rata kenaikan volume kendaraan pada 5 tahun sebelumnya yakni tahun 2012 – 2016 dengan kenaikan rata-rata 1.5%, adapun hasil perhitungan ialah sebagai berikut ini :

Tabel 4.12
Proyeksi Jumlah Kendaraan Parkir Konvensional

Sumber : Data yang diolah

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan proyeksi jumlah kendaraan parkir konvensional, dimana dasar perhitungan proyeksi kendaraan diambil dari nilai rata – rata kenaikan volume kendaraan pada tahun 2012 – 2016, hasil perhitungan yang diperoleh adalah proyeksi volume kendaraan untuk roda 2 ialah 862.440 kendaraan dan untuk roda 4 ialah 569.408 kendaraan. Volume kendaraan R2 lebih banyak dibanding volume kendaraan R4.

Tabel 4.13
Proyeksi Pendapatan Parkir Konvensional

Sumber : Data yang diolah

Tabel di atas menjelaskan mengenai proyeksi tarif konvensional dan proyeksi pendapatan parkir. Proyeksi tarif konvensional masih sesuai dengan peraturan Walikota Surabaya nomor 3 tahun 2017. Proyeksi pendapatan parkir diperoleh dari mengalikan volume kendaraan dengan tarif kendaraan, maka akan diperoleh proyeksi pendapatan parkir konvensional pada tahun 2017 – 2023.

4.2.7 Proyeksi Volume Kendaraan Parkir Meter

Proyeksi volume kendaraan parkir adalah perkiraan volume kendaraan pada tahun 2017 sampai 2023 yang dihitung dari tingkat kenaikan penjualan kendaraan pada tahun 2017, adapun hasil perhitungan proyeksi volume kendaraan parkir meter adalah sabagai berikut :

Tabel 4.14
Proyeksi Volume Kendaraan Parkir Meter

Sumber : Data yang diolah

Tabel 4.13 di atas menjelaskan proyeksi jumlah kendaraan pada parkir meter, dasar pengambilan proyeksi kendaraan ini diambil dari rata – rata peningkatan penjualan kendaraan kota Surabaya pada tahun 2017 sebesar

4%, sehingga hasil perhitungan menunjukkan proyeksi volume kendaraan mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Tabel 4.15
Proyeksi Pendapatan Kendaraan Parkir Meter

Sumber : Data yang diolah

Tabel di atas menjelaskan mengenai proyeksi tarif dan proyeksi pendapatan parkir meter. Proyeksi tarif parkir meter sama dengan proyeksi tarif parkir konvensional yaitu sesuai dengan peraturan Walikota Surabaya nomor 3 tahun 2017. Dengan mengalikan volume kendaraan dengan tarif kendaraan, maka akan diperoleh proyeksi pendapatan parkir meter pada tahun 2017 – 2023.

4.2.8 Proyeksi Biaya

Proyeksi biaya adalah perkiraan biaya operasional pada parkir konvensional pada Tahun 2017 sampai 2023, biaya operasional pada parkir konvensional ini adalah biaya gaji jukir, dimana gaji jukir dianggarkan 30% dari total proyeksi pendapatan parkir per tahun, adapun hasil perhitungannya adalah sebagai berikut ini:

Tabel 4.16**Proyeksi Biaya Operasional Parkir Konvensional**

Sumber : Data yang diolah

Berdasarkan data di atas, dapat diketahui proyeksi biaya operasional pada parkir konvensional yakni biaya gaji jukir dari tahun 2017 – 2023 yakni Rp 1.371.575.111

Biaya operasional parkir meter di proyeksikan meningkat 5% per tahun, dengan acuan dasar biaya adalah biaya operasional pada tahun 2017. Adapun biaya operasional pada parkir meter terdiri dari biaya gaji, biaya kertas roll dan sim card. Hasil penghitungan biaya operasional pada parkir meter adalah sebagai berikut :

Tabel 4.17**Proyeksi Biaya Operasional Parkir Meter**

Sumber : Data yang diolah

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui biaya operasional parkir meter terdiri dari biaya gaji, biaya kertas roll dan sim card. Adapun total biaya operasional yakni pada tahun 2017-2023 adalah Rp 335.764.249

4.2.9 Proyeksi Pendapatan Bersih Parkir Konvensional

Pendapatan bersih ialah pendapatan yang diperoleh setelah dilakukan penghitungan yakni total pendapatan parkir konvensional dikurangi total biaya operasional parkir konvensional. Adapun hasil penghitungannya ialah sebagai berikut :

Tabel 4.18

Proyeksi Pendapatan Bersih Parkir Konvensional

Sumber : Data yang diolah

Berdasarkan data diatas dapat diketahui total proyeksi pendapatan bersih parkir konvensional pada tahun 2017 sampai 2023 yakni, Rp 3.200.341.925

4.2.10 Proyeksi Pendapatan Bersih Parkir Meter

Pendapatan bersih ialah pendapatan yang diperoleh setelah dilakukan penghitungan yakni total pendapatan parkir meter dikurangi total biaya operasional parkir meter. Adapun hasil penghitungannya ialah sebagai berikut

Tabel 4.19
Proyeksi Pendapatan Bersih Parkir Meter

Sumber : Data yang diolah

Berdasarkan tabel di atas maka dapat diketahui total proyeksi pendapatan bersih parkir meter pada tahun 2017 sampai 2023 yakni, Rp 6.264.477.127

4.2.11 Proyeksi Selisih Pendapatan Bersih Parkir Konvensional – Parkir Meter

Proyeksi selisih pendapatan bersih adalah selisih pendapatan bersih antara pendapatan bersih parkir konvensional dengan parkir meter, adapun hasil penghitungannya adalah sebagai berikut :

Tabel 4.20
Perbandingan Pendapatan dan Biaya Parkir

Sumber : Data yang diolah

Tabel 4.19 menjelaskan selisih penerimaan dan biaya antara parkir konvensional dan parkir meter. Pada parkir konvensional pendapatan bersih yang diperoleh adalah Rp 3.200.341.925 sedangkan proyeksi pendapatan bersih pada parkir meter adalah Rp 6.264.477.127 maka diketahui selisih antara pendapatan parkir konvensional dengan parkir meter yaitu sebesar Rp 3.064.135.202

4.2.12 Penilaian Kelayakan Investasi

Untuk mengetahui penilaian investasi layak atau tidak layak maka dilakukan dengan menggunakan 4 metode penelitian. Adapun penjelasan untuk masing – masing penghitungan ialah sebagai berikut :

1. Payback Periode (PP)

Analisa yang diperlukan untuk menghitung periode (tahun) yang diperlukan untuk mengembalikan atau menutupi biaya awal. Analisis periode pengembalian menghitung pendapatan (*cash flow*) yang diperoleh setiap tahun. Periode pengembalian untuk investasi total :

Investasi Awal	1,253,203,600
Kas bersih tahun 1	351,217,582
	901,986,019
Kas Bersih tahun 2	377,917,845
	524,068,173
Kas Bersih tahun 3	405,848,299
	118,219,874

$$PP = \frac{\text{Investasi}}{\text{Kas bersih / Tahun}} \times 12$$

$$PP = \frac{118,219,874}{435,060,525} \times 12$$

$$PP = 3.260784204$$

Maka Payback Period adalah 3 tahun 3 bulan

2. Net Present Value (NPV)

Cara untuk menghitung selisih antara PV kas bersih dan PV investasi selama umur investasi,

Tabel 4.21

Perhitungan Net Present Value dengan Kas Berbeda

Total PV Kas bersih	= Rp. 1.501.718.871
Total PV Investasi	= <u>Rp. 1.253.203.600</u>
NPV	= Rp. 248.515.271

3. Internal Rate of Return

Cara untuk mengukur tingkat pengembalian hasil intern.

Tabel 4.22

Perhitungan Net Present Value dengan DF 20%

Nilai NPV Positif, Yaitu = Rp. 1.501.718.871
 = Rp. 1.253.203.600
 = Rp. 248.515.271

Tabel 4.23

Perhitungan Net Present Value dengan DF 28%

Nilai NPV Negatif Yaitu = Rp. 1.203.599.763
 = Rp. 1.253.203.600
 = Rp. (49.603.837)

Tabel 4.24

Perhitungan Net Present Value dengan Kas Berbeda

Interpolasi	PVIFA	PVIFA
20%	1.501.718.871	1.501.718.871
Initial investmen		1.253.203.600 (-)
28%	$\frac{1.203.599.763 (-)}{298.119.108}$	248.515.271

$$\begin{aligned}
 \text{IRR} &= i^1 + \frac{\text{NPV}^1}{\text{NPV}^1 - \text{NPV}^2} \times (i^2 - i^1) \\
 &= 20 + \frac{248.515.271 \times 8}{298.119.108} \\
 &= 20 + 6,68885398 \\
 &= 26,6888539 \quad (27\%)
 \end{aligned}$$

4. Profitability Index (PI)

Merupakan rasio aktivitas dari jumlah nilai sekarang penerimaan bersih dengan nilai sekarang pengeluaran investasi selama umur investasi.

Rumus mencari PI

$$\text{PI} = (\sum \text{PV Kas Bersih} : \sum \text{PV Investasi}) \times 100\%$$

$$\begin{aligned} &= (\text{Rp } 1.501.718.871 : \text{Rp. } 1.253.203.600) \times 100\% \\ &= 1.198303987 \\ &= 1.2 \text{ kali} \end{aligned}$$

4.4 Pembahasan

4.4.1 Sistem Parkir konvensional dan Sistem Parkir Meter

Sistem parkir konvensional yaitu system parkir yang menggunakan karcis manual dari Dinas Perhubungan Kota Surabaya yang dikasih oleh juru parkir. Untuk biaya gaji parkir konvensional diatur oleh juru parkir sendiri yaitu dngan mengambil 30% dari hasil yang diterima, sedangkan parkir meter yaitu parkir yang menggunakan alat meter yang sangat memudahkan bagi pengunjung maupun bagi juru parkir keuntungan bagi pengguna jasa yaitu tidak perlu repot – repot mencari uang untuk membayar parkir, kalau untuk juru parkir yaitu mendapatkan gaji tetap sebesar Rp, 2.000.000,- dari Pemerintahan kota Surabaya. Retribusi parkir meter langsung masuk ke Bank Kas Daerah kota Surabaya. Dari perbedaan atau perbandingan diatas maka, sistem konvensional dan sistem parkir meter kalau dilihat dari Sistem sudah terlihat kalau parkir meter yang lebih efektif, kalau dari segi pendapatan sangat jauh selisih yang didapat. Pendapatan parkir meter 50% lebih banyak dari parkir konvensional. Disini dapat terlihat bahwa banyaknya tingkat kecurangan dan kebocoran pendapatan retribusi yang dilakukan oleh juru parkir. Dengan adanya Sistem parkir meter ini juru parkir tidak dapat

melakukan kecurangan dengan menggunakan karcis yang tanpa tanggal maupun karcis yang kadaluarsa sehingga meminimalisir tingkat kebocoran atau pungutan retribusi liar yang dilakukan oleh juru parkir dan sangat menguntungkan.

4.4.2 Perhitungan Penilaian Kelayakan Investasi

Untuk menghitung penilaian kelayakan investasi dilakukan dengan menggunakan beberapa metode penelitian yakni *Payback Period* (PP), *Net Present Value* (NPV), *Internal Rate Of Return* (IRR) dan *Profitability Index* (PI). Adapun penjelasan untuk masing – masing penghitungan ialah sebagai berikut :

1. *Payback period* Merupakan teknik penilaian terhadap jangka waktu (periode) pengembalian investari suatu proyek atau usaha dengan cara nilai investasi dibagi kas bersih pertahun dan dikalikan seratus persen. Dalam penelitian ini diketahui bahwa nilai investasi adalah Rp. 1,253,203,600 dan total kas bersih pertahun adalah Rp 435,060,525 hasil pembagian ini menunjukkan hasil PP sebesar 3,260784204. Ini dapat diartikan bahwa *Payback Periode* (PP) dalam kelayakan bisnis parkir meter ini adalah 3 Tahun 3 Bulan.
2. *Net Present Value* (NPV). Merupakan perbandingan antara PV kas bersih (PV of Proceed) dan PV Investasi (*Capital Outlays*) selama umur investasi. Selisih antara nilai kedua PV tersebut yang kita kenal dengan *Net Present Value* (NPV). Dalam penelitian ini diketahui bahwa PV Kas Bersih senilai

Rp 1.501.718.871 dan total PV Investasi adalah Rp. 1.253.203.600 sehingga nilai NPV adalah Rp 248.515.271.

3. Internal Rate Of Return (IRR). Merupakan alat untuk mengukur tingkat pengembalian hasil internal, dimana NPV dihitung dengan kas yang berbeda. Pada penelitian ini menggunakan tingkat bunga 20% yang dikalikan dengan kas bersih sehingga tingkat pengembalian hasil intern adalah 27% lebih besar dari nilai standart.
4. Profitability Index (PI). Merupakan rasio aktivitas dari jumlah nilai sekarang penerimaan bersih dengan nilai sekarang pengeluaran investasi selama umur investasi. Adapun cara menghitung PI adalah total PV kas bersih dibagi total PV Investasi dan dikalikan seratus persen, dalam penelitian ini diketahui nilai total PV kas bersih adalah Rp 1.501.718.871 dan total PV Investasi adalah Rp. 1.253.203.600, sehingga nilai PI dalam penelitian ini adalah 1.2 kali. Untuk proyek ini nilai dari PI sebesar 1.2 kali. Hal ini menunjukkan selisih keuntungan tiap tahun lebih besar dibanding selisih dari biayanya. Sehingga dengan demikian proyek ini dapat dikatakan layak.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa diatas pengolahan data yang telah dilakukan, menghasilkan beberapa hal yang dapat disimpulkan antara lain:

1. Payback period merupakan teknik penilaian terhadap jangka waktu (Periode) pengembalian investasi suatu proyek atau usaha, maka dari hasil yang di peroleh sebesar 3 Tahun 3 bulan bisa dikatakan layak karena lebih kecil dari umur ekonomis.
2. Net Present Value (NPV) merupakan perbandingan antara PV kas bersih dengan PV investasi selama umur investasi. Selisih antara kedua PV tersebut yang dikenal sebagai NPV, maka hasil yang di peroleh yaitu sebesar Rp, 248.515.271,- bisa dikatakan layak atau investasi diterima karena NPV Positif.
3. Internal Rate of Return (IRR) merupakan alat untuk mengukur tingkat pengembalian hasil intern, maka hasil yang diperoleh sebesar 27% bias dikatakan layak atau diterima karena IRR lebih besar dari tingkat bunga.
4. Profitability Index (PI) merupakan rasio aktivitas dari jumlah nilai sekarang penerimaan bersih dengan nilai sekarang investasi selama umur investasi, maka hasil yang diperoleh sebesar 1,2 kali bias dikatakan layak atau diterima karena PI lebih besar dari 1.

Dengan demikian dan dari segi finansial, rencana usaha ini layak untuk diimplemetasikan.

5.2. Saran

Analisis kelayakan finansial penggunaan sistem parkir meter untuk menggantikan sistem parkir konvensional untuk meningkatkan pendapatan asli Daerah kota Surabaya (Study kasus di area parkir Balai kota Surabaya) terdapat beberapa kekurangan dalam proses implementasinya. Sehingga sangat diperlukan saran untuk membangun dan dapat digunakan untuk memperbaiki dalam penerapan yang lebih maksimal. Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan diatas. Terdapat beberapa saran dari peneliti yang berguna antara lain :

1. Pengawas Dinas Perhubungan Kota Surabaya harus lebih aktif mengawasi kinerja para juru parkir sehingga tidak ditemukannya lagi kelalaian yang dilakukan oleh juru parkir dalam mengawasi kendaraan milik pengguna jasa parkir
2. Untuk meningkatkan PAD sangat cocok kalau kedepannya menggunakan biaya progresif, maka Dinas Perhubungan Kota Surabaya juga harus mengkaji retribusi tarif parkir di masa yang akan datang.
3. Agar masyarakat lebih memahami secara benar mengenai parkir meter dan cara pembayarannya maka Pemerintah Kota Surabaya harus terus menerus melakukan sosialisasi terkait parkir meter. Dengan demikian masyarakat bisa lebih tegas menolak membayar parkir yang melebihi tarif oleh juru parkir.
4. Adanya penggunaan parkir meter diharapkan Pendapatan Asli Daerah selalu meningkat setiap tahunnya dan tidak ada kebocoran atau kecurangan oleh juru parkir.

DAFTAR PUSTAKA

- Putri, Rahmawati Widya. 2016. *Analisis Kontibusi Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah kabupaten Malang (Studi Pada Universitas Negeri Malang)*. Jurnal Ilmu Manajemen, (online), (<http://www.academia.edu>) diakses 3 april 2017)
- Mujiningsih, Mega Indah. 2013. *Analisis Kelayakan Usaha dan Strategi Pengembangan Industri Kecil Tempe di kecamatan Matesih kabupaten Karanganyar*. Jurnal Manajemen, (online), (<http://lib.unnes.ac.id>, diakses 30 Oktober 2013)
- Sugeng. 2013. *Rekayasa Lalu Lintas (Studi Pada Mahasiswa Di Surakarta)*. Blogger, (online). (www.Galeripustaka.com, diakses 7 Mei 2013)
- Dr. Kasmir, S.E., M.M & Jakfar, S.E., M.M. 2012. *Study Kelayakan Bisnis*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Peraturan Daerah nomor 1 Tahun 2009, Tentang Penyelenggaraan Perparkiran dan Retribusi Parkir
- Peraturan Daerah Kota Surabaya nomor 8 Tahun 2012, Tentang Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum
- Peraturan Wali kota Surabaya nomor 3 Tahun 2017, Tentang Pedoman penetapan Parkir Zona di kota Surabaya
- Undang-undang no.34 Tahun 2000, Tentang Pajak dan Retribusi Daerah

LAMPIRAN

A. Pendapatan Parkir Meter Bulan Februari 2017

TANGGAL	KENDARAAN		PENDAPATAN
	R2	R4	
02 Februari 2017	867	642	Rp 2.793.000
03 Februari 2017	626	559	Rp 2.303.000
04 Februari 2017	848	295	Rp 1.733.000
05 Februari 2017	784	305	Rp 1.699.000
06 Februari 2017	777	592	Rp 2.553.000
07 Februari 2017	772	566	Rp 2.470.000
08 Februari 2017	772	566	Rp 2.470.000
09 Februari 2017	897	531	Rp 2.490.000
10 Februari 2017	917	604	Rp 2.729.000
11 Februari 2017	757	404	Rp 1.969.000
12 Februari 2017	547	196	Rp 1.135.000
13 Februari 2017	855	538	Rp 2.469.000
14 Februari 2017	828	538	Rp 2.442.000
15 Februari 2017	493	183	Rp 1.042.000
16 Februari 2017	794	517	Rp 2.345.000
17 Februari 2017	827	531	Rp 2.420.000
18 Februari 2017	905	249	Rp 1.652.000
19 Februari 2017	815	281	Rp 1.658.000
20 Februari 2017	851	517	Rp 2.402.000
21 Februari 2017	843	512	Rp 2.379.000
22 Februari 2017	874	527	Rp 2.455.000
23 Februari 2017	920	507	Rp 2.441.000
24 Februari 2017	421	280	Rp 1.261.000
25 Februari 2017	468	185	Rp 1.023.000
26 Februari 2017	459	207	Rp 1.080.000
27 Februari 2017	833	512	Rp 2.369.000
28 Februari 2017	857	515	Rp 2.402.000
	20.607	11.859	Rp 56.184.000

B. Pendapatan Parkir Meter Bulan Maret 2017

TANGGAL	KENDARAAN		PENDAPATAN
	R2	R4	
01 Maret 2017	900	520	Rp 2.460.000
02 Maret 2017	826	526	Rp 2.404.000
03 Maret 2017	885	540	Rp 2.506.000
04 Maret 2017	844	265	Rp 1.639.000
05 Maret 2017	611	223	Rp 1.280.000
06 Maret 2017	821	533	Rp 2.420.000
07 Maret 2017	766	490	Rp 2.236.000
08 Maret 2017	798	514	Rp 2.340.000
09 Maret 2017	794	515	Rp 2.339.000
10 Maret 2017	786	528	Rp 2.370.000
11 Maret 2017	805	212	Rp 1.441.000
12 Maret 2017	325	154	Rp 787.000
13 Maret 2017	655	437	Rp 1.966.000
14 Maret 2017	719	461	Rp 2.102.000
15 Maret 2017	781	466	Rp 2.179.000
16 Maret 2017	701	452	Rp 2.057.000
17 Maret 2017	789	469	Rp 2.196.000
18 Maret 2017	538	255	Rp 1.303.000
19 Maret 2017	565	158	Rp 1.039.000
20 Maret 2017	634	455	Rp 3.543.000
21 Maret 2017	632	486	Rp 3.694.000
22 Maret 2017	605	435	Rp 3.385.000
23 Maret 2017	644	448	Rp 3.528.000
24 Maret 2017	710	467	Rp 3.755.000
25 Maret 2017	321	238	Rp 1.832.000
26 Maret 2017	318	120	Rp 1.236.000
27 Maret 2017	866	444	Rp 3.952.000
28 Maret 2017	472	164	Rp 1.764.000
29 Maret 2017	645	449	Rp 3.535.000
30 Maret 2017	613	465	Rp 3.551.000
31 Maret 2017	361	192	Rp 1.682.000
	20.730	12.081	Rp 72.521.000

C. Pendapatan Parkir Meter Bulan April 2017

TANGGAL	KEDARAAN		PENDAPATAN
	R2	R4	
01 April 2017	497	355	Rp 2.769.000
02 April 2017	366	206	Rp 1.762.000
03 April 2017	669	403	Rp 3.353.000
04 April 2017	615	410	Rp 3.280.000
05 April 2017	667	352	Rp 3.094.000
06 April 2017	641	374	Rp 3.152.000
07 April 2017	649	367	Rp 3.133.000
08 April 2017	389	138	Rp 1.468.000
09 April 2017	355	150	Rp 1.460.000
10 April 2017	610	343	Rp 2.935.000
11 April 2017	551	355	Rp 2.877.000
12 April 2017	612	389	Rp 3.169.000
13 April 2017	667	372	Rp 3.194.000
14 April 2017	338	191	Rp 1.631.000
15 April 2017	359	241	Rp 1.923.000
16 April 2017	726	204	Rp 2.472.000
17 April 2017	576	344	Rp 2.872.000
18 April 2017	562	354	Rp 2.894.000
19 April 2017	541	346	Rp 2.812.000
20 April 2017	603	337	Rp 2.891.000
21 April 2017	570	357	Rp 2.925.000
22 April 2017	696	200	Rp 2.392.000
23 April 2017	564	180	Rp 2.028.000
24 April 2017	294	153	Rp 1.353.000
25 April 2017	614	352	Rp 2.988.000
26 April 2017	589	364	Rp 2.998.000
27 April 2017	608	385	Rp 3.141.000
28 April 2017	341	172	Rp 1.542.000
29 April 2017	506	177	Rp 1.897.000
30 April 2017	611	212	Rp 2.282.000
	16.386	8.783	Rp 76.687.000

D. Pendapatan Parkir Meter Bulan Mei 2017

TANGGAL	KEDARAAN		PENDAPATAN
	R2	R4	
01 Mei 2017	252	76	Rp 884.000
02 Mei 2017	680	384	Rp 3.280.000
03 Mei 2017	621	390	Rp 3.192.000
04 Mei 2017	658	380	Rp 3.216.000
05 Mei 2017	658	400	Rp 3.316.000
06 Mei 2017	656	302	Rp 2.822.000
07 Mei 2017	639	185	Rp 2.203.000
08 Mei 2017	588	424	Rp 3.296.000
09 Mei 2017	646	396	Rp 3.272.000
10 Mei 2017	648	426	Rp 3.426.000
11 Mei 2017	170	147	Rp 1.075.000
12 Mei 2017	621	413	Rp 3.307.000
13 Mei 2017	580	355	Rp 2.935.000
14 Mei 2017	482	164	Rp 1.784.000
15 Mei 2017	611	398	Rp 3.212.000
16 Mei 2017	627	396	Rp 3.234.000
17 Mei 2017	629	403	Rp 3.273.000
18 Mei 2017	546	392	Rp 3.052.000
19 Mei 2017	634	415	Rp 3.343.000
20 Mei 2017	543	313	Rp 2.651.000
21 Mei 2017	435	148	Rp 1.610.000
22 Mei 2017	758	434	Rp 3.686.000
23 Mei 2017	659	419	Rp 3.413.000
24 Mei 2017	621	424	Rp 3.362.000
25 Mei 2017	420	252	Rp 2.100.000
26 Mei 2017	162	113	Rp 889.000
27 Mei 2017	333	251	Rp 1.921.000
28 Mei 2017	92	74	Rp 554.000
29 Mei 2017	481	411	Rp 3.017.000
30 Mei 2017	453	414	Rp 2.976.000
31 Mei 2017	378	392	Rp 2.716.000
	16.281	10.091	Rp 83.017.000

E. Pendapatan Parkir Meter Bulan Juni 2017

TANGGAL	KEDARAAN		PENDAPATAN	
	R2	R4		
01 Juni 2017	213	194	Rp	1.396.000
02 Juni 2017	568	344	Rp	2.856.000
03 Juni 2017	380	294	Rp	2.230.000
04 Juni 2017	185	98	Rp	860.000
05 Juni 2017	506	395	Rp	2.987.000
06 Juni 2017	478	411	Rp	3.011.000
07 Juni 2017	494	399	Rp	2.983.000
08 Juni 2017	475	411	Rp	3.005.000
09 Juni 2017	493	355	Rp	2.761.000
10 Juni 2017	604	192	Rp	2.168.000
11 Juni 2017	187	105	Rp	899.000
12 Juni 2017	539	308	Rp	2.618.000
13 Juni 2017	395	381	Rp	2.695.000
14 Juni 2017	435	377	Rp	2.755.000
15 Juni 2017	462	385	Rp	2.849.000
16 Juni 2017	417	381	Rp	2.739.000
17 Juni 2017	378	246	Rp	1.986.000
18 Juni 2017	128	105	Rp	781.000
19 Juni 2017	483	341	Rp	2.671.000
20 Juni 2017	417	375	Rp	2.709.000
21 Juni 2017	375	355	Rp	2.525.000
22 Juni 2017	358	314	Rp	2.286.000
23 Juni 2017	49	125	Rp	723.000
24 Juni 2017	10	72	Rp	380.000
25 Juni 2017	37	52	Rp	334.000
26 Juni 2017	28	53	Rp	321.000
27 Juni 2017	56	65	Rp	437.000
28 Juni 2017	31	83	Rp	477.000
29 Juni 2017	38	94	Rp	546.000
30 Juni 2017	53	131	Rp	761.000
	9.272	7.441	Rp	55.749.000

F. Pendapatan Parkir Meter Bulan Juli 2017

TANGGAL	KEDARAAN		PENDAPATAN
	R2	R4	
01 Juli 2017	213	186	Rp 1.356.000
02 Juli 2017	436	345	Rp 2.597.000
03 Juli 2017	380	275	Rp 2.135.000
04 Juli 2017	425	119	Rp 1.445.000
05 Juli 2017	367	287	Rp 2.169.000
06 Juli 2017	431	392	Rp 2.822.000
07 Juli 2017	398	402	Rp 2.806.000
08 Juli 2017	503	369	Rp 2.851.000
09 Juli 2017	493	274	Rp 2.356.000
10 Juli 2017	411	173	Rp 1.687.000
11 Juli 2017	187	194	Rp 1.344.000
12 Juli 2017	389	274	Rp 2.148.000
13 Juli 2017	452	299	Rp 2.399.000
14 Juli 2017	425	362	Rp 2.660.000
15 Juli 2017	408	376	Rp 2.696.000
16 Juli 2017	375	329	Rp 2.395.000
17 Juli 2017	319	273	Rp 2.003.000
18 Juli 2017	128	124	Rp 876.000
19 Juli 2017	389	283	Rp 2.193.000
20 Juli 2017	382	201	Rp 1.769.000
21 Juli 2017	427	298	Rp 2.344.000
22 Juli 2017	358	311	Rp 2.271.000
23 Juli 2017	189	129	Rp 1.023.000
24 Juli 2017	287	291	Rp 2.029.000
25 Juli 2017	235	150	Rp 1.220.000
26 Juli 2017	198	128	Rp 1.036.000
27 Juli 2017	127	291	Rp 1.709.000
28 Juli 2017	159	111	Rp 873.000
29 Juli 2017	39	192	Rp 1.038.000
30 Juli 2017	53	226	Rp 1.236.000
31 Juli 2017	142	200	Rp 1.284.000
	9.725	7.864	Rp 58.770.000

G. Pendapatan Parkir Meter Bulan Agustus 2017

TANGGAL	KEDARAAN		PENDAPATAN
	R2	R4	
01 Agustus 2017	518	451	Rp 3.291.000
02 Agustus 2017	576	389	Rp 3.097.000
03 Agustus 2017	486	457	Rp 3.257.000
04 Agustus 2017	479	283	Rp 2.373.000
05 Agustus 2017	509	427	Rp 3.153.000
06 Agustus 2017	592	501	Rp 3.689.000
07 Agustus 2017	494	472	Rp 3.348.000
08 Agustus 2017	512	371	Rp 2.879.000
09 Agustus 2017	526	451	Rp 3.307.000
10 Agustus 2017	579	361	Rp 2.963.000
11 Agustus 2017	594	274	Rp 2.558.000
12 Agustus 2017	562	431	Rp 3.279.000
13 Agustus 2017	496	473	Rp 3.357.000
14 Agustus 2017	563	382	Rp 3.036.000
15 Agustus 2017	499	516	Rp 3.578.000
16 Agustus 2017	577	422	Rp 3.264.000
17 Agustus 2017	598	371	Rp 3.051.000
18 Agustus 2017	505	293	Rp 2.475.000
19 Agustus 2017	519	341	Rp 2.743.000
20 Agustus 2017	565	375	Rp 3.005.000
21 Agustus 2017	578	355	Rp 2.931.000
22 Agustus 2017	553	314	Rp 2.676.000
23 Agustus 2017	585	271	Rp 2.525.000
24 Agustus 2017	499	321	Rp 2.603.000
25 Agustus 2017	555	432	Rp 3.270.000
26 Agustus 2017	516	265	Rp 2.357.000
27 Agustus 2017	519	376	Rp 2.918.000
28 Agustus 2017	501	214	Rp 2.072.000
29 Agustus 2017	590	271	Rp 2.535.000
30 Agustus 2017	589	299	Rp 2.673.000
	16.234	11.159	Rp 88.263.000

H. Pendapatan Parkir Meter Bulan September 2017

TANGGAL	KEDARAAN		PENDAPATAN	
	R2	R4		
01 September 2017	313	194	Rp	1.596.000
02 September 2017	568	344	Rp	2.856.000
03 September 2017	480	294	Rp	2.430.000
04 September 2017	185	243	Rp	1.585.000
05 September 2017	552	395	Rp	3.079.000
06 September 2017	478	411	Rp	3.011.000
07 September 2017	594	399	Rp	3.183.000
08 September 2017	475	411	Rp	3.005.000
09 September 2017	493	327	Rp	2.621.000
10 September 2017	604	192	Rp	2.168.000
11 September 2017	187	152	Rp	1.134.000
12 September 2017	539	200	Rp	2.078.000
13 September 2017	495	381	Rp	2.895.000
14 September 2017	535	377	Rp	2.955.000
15 September 2017	498	289	Rp	2.441.000
16 September 2017	417	381	Rp	2.739.000
17 September 2017	477	246	Rp	2.184.000
18 September 2017	509	258	Rp	2.308.000
19 September 2017	483	341	Rp	2.671.000
20 September 2017	514	372	Rp	2.888.000
21 September 2017	375	356	Rp	2.530.000
22 September 2017	537	314	Rp	2.644.000
23 September 2017	488	125	Rp	1.601.000
24 September 2017	558	321	Rp	2.721.000
25 September 2017	421	324	Rp	2.462.000
26 September 2017	454	134	Rp	1.578.000
27 September 2017	475	176	Rp	1.830.000
28 September 2017	385	183	Rp	1.685.000
29 September 2017	411	295	Rp	2.297.000
30 September 2017	395	316	Rp	2.370.000
	13.895	8.751	Rp	71.545.000

I. Pendapatan Parkir Meter Bulan Oktober 2017

TANGGAL	KEDARAAN		PENDAPATAN
	R2	R4	
01 Oktober 2017	313	194	Rp 1.596.000
02 Oktober 2017	458	344	Rp 2.636.000
03 Oktober 2017	356	294	Rp 2.182.000
04 Oktober 2017	243	98	Rp 976.000
05 Oktober 2017	400	395	Rp 2.775.000
06 Oktober 2017	379	411	Rp 2.813.000
07 Oktober 2017	294	279	Rp 1.983.000
08 Oktober 2017	405	411	Rp 2.865.000
09 Oktober 2017	493	355	Rp 2.761.000
10 Oktober 2017	504	192	Rp 1.968.000
11 Oktober 2017	264	105	Rp 1.053.000
12 Oktober 2017	439	308	Rp 2.418.000
13 Oktober 2017	295	381	Rp 2.495.000
14 Oktober 2017	335	377	Rp 2.555.000
15 Oktober 2017	362	284	Rp 2.144.000
16 Oktober 2017	417	381	Rp 2.739.000
17 Oktober 2017	378	246	Rp 1.986.000
18 Oktober 2017	259	105	Rp 1.043.000
19 Oktober 2017	315	341	Rp 2.335.000
20 Oktober 2017	417	375	Rp 2.709.000
21 Oktober 2017	375	241	Rp 1.955.000
22 Oktober 2017	358	313	Rp 2.281.000
23 Oktober 2017	243	125	Rp 1.111.000
24 Oktober 2017	337	112	Rp 1.234.000
25 Oktober 2017	157	167	Rp 1.149.000
26 Oktober 2017	391	125	Rp 1.407.000
27 Oktober 2017	327	121	Rp 1.259.000
28 Oktober 2017	265	113	Rp 1.095.000
29 Oktober 2017	199	94	Rp 868.000
30 Oktober 2017	178	131	Rp 1.011.000
31 Oktober 2017	238	124	Rp 1.096.000
	10.394	7.542	Rp 58.498.000

J. Pendapatan Parkir Meter Bulan November 2017

TANGGAL	KEDARAAN		PENDAPATAN	
	R2	R4		
01 November 2017	498	194	Rp	1.966.000
02 November 2017	568	344	Rp	2.856.000
03 November 2017	380	294	Rp	2.230.000
04 November 2017	378	98	Rp	1.246.000
05 November 2017	506	395	Rp	2.987.000
06 November 2017	478	411	Rp	3.011.000
07 November 2017	494	399	Rp	2.983.000
08 November 2017	475	411	Rp	3.005.000
09 November 2017	493	355	Rp	2.761.000
10 November 2017	604	192	Rp	2.168.000
11 November 2017	562	105	Rp	1.649.000
12 November 2017	539	308	Rp	2.618.000
13 November 2017	395	381	Rp	2.695.000
14 November 2017	637	377	Rp	3.159.000
15 November 2017	462	385	Rp	2.849.000
16 November 2017	417	381	Rp	2.739.000
17 November 2017	378	246	Rp	1.986.000
18 November 2017	474	105	Rp	1.473.000
19 November 2017	483	341	Rp	2.671.000
20 November 2017	417	375	Rp	2.709.000
21 November 2017	375	355	Rp	2.525.000
22 November 2017	358	314	Rp	2.286.000
23 November 2017	489	140	Rp	1.678.000
24 November 2017	579	356	Rp	2.938.000
25 November 2017	367	278	Rp	2.124.000
26 November 2017	426	214	Rp	1.922.000
27 November 2017	421	371	Rp	2.697.000
28 November 2017	299	253	Rp	1.863.000
29 November 2017	579	189	Rp	2.103.000
30 November 2017	529	369	Rp	2.903.000
	14.060	8.936	Rp	72.800.000

K. Pendapatan Parkir Meter Bulan Desember 2017

TANGGAL	KEDARAAN		PENDAPATAN	
	R2	R4		
01 Desember 2017	579	194	Rp	2.128.000
02 Desember 2017	667	244	Rp	2.554.000
03 Desember 2017	598	294	Rp	2.666.000
04 Desember 2017	523	98	Rp	1.536.000
05 Desember 2017	609	196	Rp	2.198.000
06 Desember 2017	675	311	Rp	2.905.000
07 Desember 2017	494	299	Rp	2.483.000
08 Desember 2017	598	411	Rp	3.251.000
09 Desember 2017	665	355	Rp	3.105.000
10 Desember 2017	604	192	Rp	2.168.000
11 Desember 2017	536	105	Rp	1.597.000
12 Desember 2017	673	208	Rp	2.386.000
13 Desember 2017	721	381	Rp	3.347.000
14 Desember 2017	619	377	Rp	3.123.000
15 Desember 2017	598	167	Rp	2.031.000
16 Desember 2017	417	89	Rp	1.279.000
17 Desember 2017	783	146	Rp	2.296.000
18 Desember 2017	678	105	Rp	1.881.000
19 Desember 2017	593	341	Rp	2.891.000
20 Desember 2017	789	214	Rp	2.648.000
21 Desember 2017	461	155	Rp	1.697.000
22 Desember 2017	679	314	Rp	2.928.000
23 Desember 2017	629	125	Rp	1.883.000
24 Desember 2017	514	72	Rp	1.388.000
25 Desember 2017	739	52	Rp	1.738.000
26 Desember 2017	572	53	Rp	1.409.000
27 Desember 2017	698	65	Rp	1.721.000
28 Desember 2017	627	83	Rp	1.669.000
29 Desember 2017	556	94	Rp	1.582.000
30 Desember 2017	598	131	Rp	1.851.000
31 Desember 2017	483	132	Rp	1.626.000
	18.975	6.003	Rp	67.965.000

UPTD PARKIR TEPI JALAN UMUM
STOK INVENTARIS ASET

NO	JENIS	STOK	SATUAN	HARGA	jumlah
1	Parkeon mesin parkir meter tipe strada PAL	10	unit	Rp 123.900.000	Rp 1.239.000.000
2	UPS APC SMC3000I [PCSMC3000I]	1	unit	Rp 10.999.000	Rp 10.999.000
3	Switch Hub HP 1810-24 Switch [J9801A]	1	unit	Rp 3.204.600	Rp 3.204.600
				Rp 138.103.600	Rp 1.253.203.600

nama	senin-jum'at	sabtu	minggu	harian	s	m	jumlah
amari	42000			22	4	5	924000
buari		54000	54000	22	4	5	486000
djamal	134500			22	4	5	2959000
fahhat	38500		7500	22	4	5	884500
h ghozali	58000	41500		22	4	5	1442000
kaderi	104500			22	4	5	2299000
karyawan	111000			22	4	5	2442000
matsa	61000		6000	22	4	5	1372000
musa	67000			22	4	5	1474000

NAMA					
	JAN	FEB	MAR	APR	MEI
amari	Rp 891.000	Rp 850.500	Rp 891.000	Rp 850.500	Rp 931.500
buari	Rp 468.000	Rp 416.000	Rp 468.000	Rp 468.000	Rp 416.000
djamal	Rp 2.948.000	Rp 2.814.000	Rp 2.948.000	Rp 2.814.000	Rp 3.082.000
fahhat	Rp 851.500	Rp 807.000	Rp 844.000	Rp 814.500	Rp 881.000
h ghozali	Rp 1.378.000	Rp 1.322.000	Rp 1.414.500	Rp 1.322.000	Rp 1.434.000
kaderi	Rp 2.266.000	Rp 2.163.000	Rp 2.266.000	Rp 2.163.000	Rp 2.369.000
karyawan	Rp 2.409.000	Rp 2.299.500	Rp 2.409.000	Rp 2.299.500	Rp 2.518.500
matsa	Rp 1.339.000	Rp 1.273.500	Rp 1.333.000	Rp 1.279.500	Rp 1.392.500
musa	Rp 1.430.000	Rp 1.365.000	Rp 1.430.000	Rp 1.365.000	Rp 1.495.000

NAMA					
	JAN	FEB	MAR	APR	MEI
amari	Rp 966.000	Rp 840.000	Rp 882.000	Rp 924.000	Rp 966.000
buari	Rp 432.000	Rp 432.000	Rp 540.000	Rp 432.000	Rp 432.000
djamal	Rp 3.093.500	Rp 2.690.000	Rp 2.824.500	Rp 2.959.000	Rp 3.093.500
fahhat	Rp 915.500	Rp 800.000	Rp 846.000	Rp 877.000	Rp 915.500
h ghozali	Rp 1.500.000	Rp 1.326.000	Rp 1.425.500	Rp 1.442.000	Rp 1.500.000
kaderi	Rp 2.403.500	Rp 2.090.000	Rp 2.194.500	Rp 2.299.000	Rp 2.403.500
karyawan	Rp 2.553.000	Rp 2.220.000	Rp 2.331.000	Rp 2.442.000	Rp 2.553.000
matsa	Rp 1.427.000	Rp 1.244.000	Rp 1.311.000	Rp 1.366.000	Rp 1.427.000
musa	Rp 1.541.000	Rp 1.340.000	Rp 1.407.000	Rp 1.474.000	Rp 1.541.000

NAMA					
	JAN	FEB	MAR	APR	MEI
amari	Rp 1.000.500	Rp 870.000	Rp 913.500	Rp 957.000	Rp 957.000
buari	Rp 448.000	Rp 448.000	Rp 560.000	Rp 448.000	Rp 504.000
djamal	Rp 3.105.000	Rp 2.700.000	Rp 2.835.000	Rp 2.970.000	Rp 2.970.000
fahhat	Rp 950.000	Rp 830.000	Rp 877.500	Rp 910.000	Rp 910.000
h ghozali	Rp 1.554.000	Rp 1.374.000	Rp 1.477.500	Rp 1.494.000	Rp 1.537.500
kaderi	Rp 2.438.000	Rp 2.120.000	Rp 2.226.000	Rp 2.332.000	Rp 2.332.000
karyawan	Rp 2.587.500	Rp 2.250.000	Rp 2.362.500	Rp 2.475.000	Rp 2.475.000
matsa	Rp 1.461.500	Rp 1.274.000	Rp 1.342.500	Rp 1.399.000	Rp 1.399.000
musa	Rp 1.587.000	Rp 1.380.000	Rp 1.449.000	Rp 1.518.000	Rp 1.518.000

NAMA					
	JAN	FEB	MAR	APR	MEI
amari	Rp 1.914.000	Rp 1.740.000	Rp 1.914.000	Rp 1.914.000	Rp 1.827.000
buari	Rp 1.008.000	Rp 896.000	Rp 1.008.000	Rp 896.000	Rp 1.008.000
djamal	Rp 5.940.000	Rp 5.400.000	Rp 5.940.000	Rp 5.940.000	Rp 5.670.000
fahhat	Rp 1.820.000	Rp 1.660.000	Rp 1.835.000	Rp 1.820.000	Rp 1.740.000
h ghozali	Rp 3.075.000	Rp 2.748.000	Rp 2.988.000	Rp 2.988.000	Rp 2.955.000
kaderi	Rp 4.664.000	Rp 4.240.000	Rp 4.664.000	Rp 4.664.000	Rp 4.452.000
karyawan	Rp 4.950.000	Rp 4.500.000	Rp 4.950.000	Rp 4.950.000	Rp 4.725.000
matsa	Rp 2.798.000	Rp 2.548.000	Rp 2.810.000	Rp 2.798.000	Rp 2.673.000
musa	Rp 3.036.000	Rp 2.760.000	Rp 3.036.000	Rp 3.036.000	Rp 2.898.000

NAMA					
	JAN	FEB	MAR	APR	MEI
amari	Rp 1.827.000	Rp 1.827.000	Rp 2.001.000	Rp 1.827.000	Rp 1.914.000
buari	Rp 1.120.000	Rp 896.000	Rp 896.000	Rp 1.120.000	Rp 1.008.000
djamal	Rp 5.670.000	Rp 5.670.000	Rp 6.210.000	Rp 5.670.000	Rp 5.940.000
fahhat	Rp 1.755.000	Rp 1.740.000	Rp 1.900.000	Rp 1.755.000	Rp 1.835.000
h ghozali	Rp 2.955.000	Rp 2.868.000	Rp 3.108.000	Rp 2.955.000	Rp 2.988.000
kaderi	Rp 4.452.000	Rp 4.452.000	Rp 4.876.000	Rp 4.452.000	Rp 4.664.000
karyawan	Rp 4.725.000	Rp 4.725.000	Rp 5.175.000	Rp 4.725.000	Rp 4.950.000
matsa	Rp 2.685.000	Rp 2.673.000	Rp 2.923.000	Rp 2.685.000	Rp 2.810.000
musa	Rp 2.898.000	Rp 2.898.000	Rp 3.174.000	Rp 2.898.000	Rp 3.036.000

BULAN (2012)

JUN	JUL	AGST	SEPT	OKT	NOV
Rp 850.500	Rp 891.000	Rp 931.500	Rp 810.000	Rp 931.500	Rp 891.000
Rp 468.000	Rp 468.000	Rp 416.000	Rp 520.000	Rp 416.000	Rp 416.000
Rp 2.814.000	Rp 2.948.000	Rp 3.082.000	Rp 2.680.000	Rp 3.082.000	Rp 2.948.000
Rp 807.000	Rp 851.500	Rp 881.000	Rp 777.500	Rp 881.000	Rp 844.000
Rp 1.358.500	Rp 1.378.000	Rp 1.434.000	Rp 1.302.500	Rp 1.434.000	Rp 1.378.000
Rp 2.163.000	Rp 2.266.000	Rp 2.369.000	Rp 2.060.000	Rp 2.369.000	Rp 2.266.000
Rp 2.299.500	Rp 2.409.000	Rp 2.518.500	Rp 2.190.000	Rp 2.518.500	Rp 2.409.000
Rp 1.273.500	Rp 1.339.000	Rp 1.392.500	Rp 1.220.000	Rp 1.392.500	Rp 1.333.000
Rp 1.365.000	Rp 1.430.000	Rp 1.495.000	Rp 1.300.000	Rp 1.495.000	Rp 1.430.000

BULAN (2013)

JUN	JUL	AGST	SEPT	OKT	NOV
Rp 840.000	Rp 966.000	Rp 924.000	Rp 882.000	Rp 966.000	Rp 882.000
Rp 540.000	Rp 432.000	Rp 486.000	Rp 486.000	Rp 432.000	Rp 486.000
Rp 2.690.000	Rp 3.093.500	Rp 2.959.000	Rp 2.824.500	Rp 3.093.500	Rp 2.824.500
Rp 807.500	Rp 915.500	Rp 877.000	Rp 846.000	Rp 915.500	Rp 838.500
Rp 1.367.500	Rp 1.500.000	Rp 1.483.500	Rp 1.384.000	Rp 1.500.000	Rp 1.425.500
Rp 2.090.000	Rp 2.403.500	Rp 2.299.000	Rp 2.194.500	Rp 2.403.500	Rp 2.194.500
Rp 2.220.000	Rp 2.553.000	Rp 2.442.000	Rp 2.331.000	Rp 2.553.000	Rp 2.331.000
Rp 1.250.000	Rp 1.427.000	Rp 1.366.000	Rp 1.311.000	Rp 1.427.000	Rp 1.305.000
Rp 1.340.000	Rp 1.541.000	Rp 1.474.000	Rp 1.407.000	Rp 1.541.000	Rp 1.407.000

BULAN (2014)

JUN	JUL	AGST	SEPT	OKT	NOV
Rp 913.500	Rp 1.000.500	Rp 913.500	Rp 957.000	Rp 1.000.500	Rp 870.000
Rp 504.000	Rp 448.000	Rp 560.000	Rp 448.000	Rp 448.000	Rp 560.000
Rp 2.835.000	Rp 3.105.000	Rp 2.835.000	Rp 2.970.000	Rp 3.105.000	Rp 2.700.000
Rp 877.500	Rp 950.000	Rp 877.500	Rp 910.000	Rp 950.000	Rp 837.500
Rp 1.434.000	Rp 1.554.000	Rp 1.477.500	Rp 1.494.000	Rp 1.554.000	Rp 1.417.500
Rp 2.226.000	Rp 2.438.000	Rp 2.226.000	Rp 2.332.000	Rp 2.438.000	Rp 2.120.000
Rp 2.362.500	Rp 2.587.500	Rp 2.362.500	Rp 2.475.000	Rp 2.587.500	Rp 2.250.000
Rp 1.342.500	Rp 1.461.500	Rp 1.342.500	Rp 1.399.000	Rp 1.461.500	Rp 1.280.000
Rp 1.449.000	Rp 1.587.000	Rp 1.449.000	Rp 1.518.000	Rp 1.587.000	Rp 1.380.000

BULAN (2015)

JUN	JUL	AGST	SEPT	OKT	NOV
Rp 1.914.000	Rp 2.001.000	Rp 1.827.000	Rp 1.914.000	Rp 1.914.000	Rp 1.827.000
Rp 896.000	Rp 896.000	Rp 1.120.000	Rp 896.000	Rp 1.008.000	Rp 1.008.000
Rp 5.940.000	Rp 6.210.000	Rp 5.670.000	Rp 5.940.000	Rp 5.940.000	Rp 5.670.000
Rp 1.820.000	Rp 1.900.000	Rp 1.755.000	Rp 1.820.000	Rp 1.820.000	Rp 1.755.000
Rp 2.988.000	Rp 3.108.000	Rp 2.955.000	Rp 2.988.000	Rp 3.075.000	Rp 2.868.000
Rp 4.664.000	Rp 4.876.000	Rp 4.452.000	Rp 4.664.000	Rp 4.664.000	Rp 4.452.000
Rp 4.950.000	Rp 5.175.000	Rp 4.725.000	Rp 4.950.000	Rp 4.950.000	Rp 4.725.000
Rp 2.798.000	Rp 2.923.000	Rp 2.685.000	Rp 2.798.000	Rp 2.798.000	Rp 2.685.000
Rp 3.036.000	Rp 3.174.000	Rp 2.898.000	Rp 3.036.000	Rp 3.036.000	Rp 2.898.000

BULAN (2016)

JUN	JUL	AGST	SEPT	OKT	NOV
Rp 1.914.000	Rp 1.827.000	Rp 2.001.000	Rp 1.914.000	Rp 1.827.000	Rp 1.914.000
Rp 896.000	Rp 1.120.000	Rp 896.000	Rp 896.000	Rp 1.120.000	Rp 896.000
Rp 5.940.000	Rp 5.670.000	Rp 6.210.000	Rp 5.940.000	Rp 5.670.000	Rp 5.940.000
Rp 1.820.000	Rp 1.755.000	Rp 1.900.000	Rp 1.820.000	Rp 1.755.000	Rp 1.820.000
Rp 2.988.000	Rp 2.955.000	Rp 3.108.000	Rp 2.988.000	Rp 2.955.000	Rp 2.988.000
Rp 4.664.000	Rp 4.452.000	Rp 4.876.000	Rp 4.664.000	Rp 4.452.000	Rp 4.664.000
Rp 4.950.000	Rp 4.725.000	Rp 5.175.000	Rp 4.950.000	Rp 4.725.000	Rp 4.950.000
Rp 2.798.000	Rp 2.685.000	Rp 2.923.000	Rp 2.798.000	Rp 2.685.000	Rp 2.798.000
Rp 3.036.000	Rp 2.898.000	Rp 3.174.000	Rp 3.036.000	Rp 2.898.000	Rp 3.036.000

DES	jumlah
Rp 850.500	Rp 10.570.500
Rp 520.000	Rp 5.460.000
Rp 2.814.000	Rp 34.974.000
Rp 814.500	Rp 10.054.500
Rp 1.358.500	Rp 16.514.000
Rp 2.163.000	Rp 26.883.000
Rp 2.299.500	Rp 28.579.500
Rp 1.279.500	Rp 15.847.500
Rp 1.365.000	Rp 16.965.000
Rp 165.848.000	

DES	jumlah
Rp 924.000	Rp 10.962.000
Rp 486.000	Rp 5.616.000
Rp 2.959.000	Rp 35.104.500
Rp 884.500	Rp 10.438.500
Rp 1.442.000	Rp 17.296.000
Rp 2.299.000	Rp 27.274.500
Rp 2.442.000	Rp 28.971.000
Rp 1.372.000	Rp 16.233.000
Rp 1.474.000	Rp 17.487.000
Rp 169.382.500	

DES	jumlah
Rp 1.000.500	Rp 11.353.500
Rp 448.000	Rp 5.824.000
Rp 3.105.000	Rp 35.235.000
Rp 950.000	Rp 10.830.000
Rp 1.554.000	Rp 17.922.000
Rp 2.438.000	Rp 27.666.000
Rp 2.587.500	Rp 29.362.500
Rp 1.461.500	Rp 16.624.500
Rp 1.587.000	Rp 18.009.000
Rp 172.826.500	

DES	jumlah
Rp 2.001.000	Rp 22.707.000
Rp 896.000	Rp 11.536.000
Rp 6.210.000	Rp 70.470.000
Rp 1.900.000	Rp 21.645.000
Rp 3.108.000	Rp 35.844.000
Rp 4.876.000	Rp 55.332.000
Rp 5.175.000	Rp 58.725.000
Rp 2.923.000	Rp 33.237.000
Rp 3.174.000	Rp 36.018.000
Rp 345.514.000	

DES	jumlah
Rp 1.914.000	Rp 22.707.000
Rp 1.008.000	Rp 11.872.000
Rp 5.940.000	Rp 70.470.000
Rp 1.820.000	Rp 21.675.000
Rp 3.075.000	Rp 35.931.000
Rp 4.664.000	Rp 55.332.000
Rp 4.950.000	Rp 58.725.000
Rp 2.798.000	Rp 33.261.000
Rp 3.036.000	Rp 36.018.000
	Rp 345.991.000

NAMA	TAHUN			
	2012	2013	2014	2015
amari	Rp 10.570.500	Rp 10.962.000	Rp 11.353.500	Rp 22.707.000
buari	Rp 5.460.000	Rp 5.616.000	Rp 5.824.000	Rp 11.536.000
djamal	Rp 34.974.000	Rp 35.104.500	Rp 35.235.000	Rp 70.470.000
fahhat	Rp 10.054.500	Rp 10.438.500	Rp 10.830.000	Rp 21.645.000
h ghozali	Rp 16.514.000	Rp 17.296.000	Rp 17.922.000	Rp 35.844.000
kaderi	Rp 26.883.000	Rp 27.274.500	Rp 27.666.000	Rp 55.332.000
karyawan	Rp 28.579.500	Rp 28.971.000	Rp 29.362.500	Rp 58.725.000
matsa	Rp 15.847.500	Rp 16.233.000	Rp 16.624.500	Rp 33.237.000
musa	Rp 16.965.000	Rp 17.487.000	Rp 18.009.000	Rp 36.018.000
JUMLAH	Rp 165.848.000	Rp 169.382.500	Rp 172.826.500	Rp 345.514.000

	2016
Rp	22.707.000
Rp	11.872.000
Rp	70.470.000
Rp	21.675.000
Rp	35.931.000
Rp	55.332.000
Rp	58.725.000
Rp	33.261.000
Rp	36.018.000
Rp	345.991.000

4.2 Data Realisasi Jumlah Kendaraan Parkir

4.2.1 Jumlah Kendaraan Parkir Konvensional

4.2.1.1 Volumen Kendaraan Parkir Konvensional

No	Periode	Jumlah Kendaraan		Rata - rata Volume Kendaraan
		Roda 2	Roda 4	
1	2012	114.121	72.629	15.563
2	2013	115.031	74.578	15.801
3	2014	115.970	76.561	16.044
4	2015	115.031	74.578	15.801
5	2016	116.031	76.607	16.053
Jumlah		576.184	374.953	79.261

4.2.1.2 Tarif Parkir Kendaraan Konvensional

No	Periode	Tarif Parkir Roda 2			Tarif Parkir Roda 4	
		Jumlah	Tarif	Total	Jumlah	Tarif
1	2012	114.121	500	57.060.500	72.629	1.500
2	2013	115.031	500	57.515.500	74.578	1.500
3	2014	115.970	500	57.985.000	76.561	1.500
4	2015	115.031	1.000	115.031.000	74.578	3.000
5	2016	116.031	1.000	116.031.000	76.607	3.000

4.2.2 Biaya Operasional Parkir Konvensional

4.2.2.1 **Biaya Gaji Jukir**

No	Periode	Pendapatan	Gaji Jukir (30% x Pendapatan)
1	2012	166.004.000	49.801.200
2	2013	169.382.500	50.814.750
3	2014	172.826.500	51.847.950
4	2015	338.765.000	101.629.500
5	2016	345.852.000	103.755.600

4.2.3 **Volumen Kendaraan Parkir Meter**

No	Periode	Jumlah Kendaraan		Jumlah
		Roda 2	Roda 4	
1	2017	166.552	100.510	267.062
Jumlah		166.552	100.510	267.062
Rata - rata Per Tahun		13.879	8.376	22.255

No	Periode	Tarif Parkir 2017		Total Pendapatan
		Jumlah	Tarif	
1	Tarif Roda 2	166.552	2.000	333.104.000
2	Tarif Roda 4	100.510	5.000	502.550.000
Jumlah				835.654.000

4.2.4 **Biaya Operasional**

No	Jenis Biaya	Biaya Per Bulan	Total Biaya
1	By. Gaji	44.000.000	528.000.000
2	By. Kertas Roll	3.025.000	36.300.000
3	Sim Card	38.500	462.000
Jumlah		47.063.500	564.762.000

4.2.5 **Invenstasi**

No	Keterangan	Unit	Harga	Total
1	Alat parkir meter	10	123.900.000	1.239.000.000
2	UPS APC	1	10.999.000	10.999.000
3	Switch Hub HP	1	3.204.600	3.204.600
Jumlah				1.253.203.600

4.3 Analisis Data

4.3.1 Proyeksi Jumlah Kendaraan Parkir Konvensional

No	Periode	Proyeksi Volume Kendaraan R2	Proyeksi Volume Kendaraan R4
1	2017	115.833	73.718
2	2018	117.570	74.824
3	2019	119.334	75.947
4	2020	121.124	77.086
5	2021	122.941	78.242
Jumlah		596.802	379.817

No	Periode
1	2012
2	2013
3	2014
4	2015
5	2016
Jumlah	

Proyeksi Pendapatan Kendaraan Parkir Konvensional

No	Periode	Proyeksi Volume Kendaraan R2	Tarif Parkir R2	Total Pendapatan R2	Proyeksi Volume Kendaraan R4	Tarif Parkir R4
1	2017	115.833	1.000	115.832.815	73.718	3.000
2	2018	117.570	1.000	117.570.307	74.824	3.000
3	2019	119.334	1.000	119.333.862	75.947	3.000
4	2020	121.124	1.000	121.123.870	77.086	3.000
5	2021	122.941	1.000	122.940.728	78.242	3.000
Jumlah		596.802		596.801.582	379.817	

4.3.2 Proyeksi Jumlah Kendaraan Parkir Meter

No	Periode	Proyeksi Volume Kendaraan R2	Proyeksi Volume Kendaraan R4
1	2017	166.552	100.510
2	2018	172.381	104.028
3	2019	178.415	107.669
4	2020	184.659	111.437
5	2021	191.122	115.338
Jumlah		893.129	538.981
Rata - rata per tahun		178.626	107.796

Proyeksi Pendapatan Kendaraan Parkir Meter

No	Periode	Proyeksi Volume Kendaraan R2	Tarif Parkir R2	Total Pendapatan R2	Proyeksi Volume Kendaraan R4	Tarif Parkir R4
1	2017	166.552	2.000	333.104.000	100.510	5.000
2	2018	172.381	2.000	344.762.640	104.028	5.000
3	2019	178.415	2.000	356.829.332	107.669	5.000
4	2020	184.659	2.000	369.318.359	111.437	5.000
5	2021	191.122	2.000	382.244.502	115.338	5.000
Jumlah		893.129		1.786.258.833	538.981	

Proyeksi Biaya

4.3.3

Proyeksi Biaya Parkir Konvensional

4.3.3.1

No	Periode	Pendapatan	Gaji Jukir (30% x Pendapatan)
1	2017	336.988.120	101.096.436
2	2018	342.042.942	102.612.883
3	2019	347.173.586	104.152.076
4	2020	352.381.190	105.714.357
5	2021	357.666.908	107.300.072
Jumlah		1.736.252.745	520.875.824

336.988.120
342.042.942
347.173.586
352.381.190
357.666.908

Proyeksi Biaya Parkir Meter

4.3.3.2

No	Jenis Biaya	Biaya Per Bulan	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
1	By. Gaji	44.000.000	528.000.000	554.400.000	582.120.000	611.226.000
2	By. Kertas Roll	3.025.000	36.300.000	38.115.000	40.020.750	42.021.788
3	Sim Card	38.500	462.000	485.100	509.355	534.823
Jumlah		47.063.500	564.762.000	593.000.100	622.650.105	653.782.610

Pendapatan Bersih Parkir Konvensional

4.3.4

No	Tahun	Pendapatan	Biaya	Pendapatan Bersih	No
1	2017	336.988.120	101.096.436	235.891.684	1
2	2018	342.042.942	102.612.883	239.430.059	2
3	2019	347.173.586	104.152.076	243.021.510	3
4	2020	352.381.190	105.714.357	246.666.833	4
5	2021	357.666.908	107.300.072	250.366.835	5
Jumlah		1.736.252.745	520.875.824	1.215.376.922	Jum

Proyeksi Selisih Pendapatan Bersih Parkir Meter Dengan Parkir Konvensional

4.3.5

No	Tahun	Pendapatan Bersih Parkir Meter	Pendapatan Bersih Parkir Konvensional	Selisih
1	2017	270.892.000	235.891.684	35.000.316
1	2018	271.901.790	239.430.059	32.471.731
3	2019	272.523.351	243.021.510	29.501.841
4	2020	272.721.917	246.666.833	26.055.084
5	2021	272.460.445	250.366.835	22.093.610
Jumlah		1.360.499.503	1.215.376.922	145.122.581

PP

4.3.6

$$PP = (\text{Investasi awal} : \text{kas bersih}) \times 12$$

Investasi Awal	1.253.203.600	1.253.203.600
Kas Bersih 6 bulan	357.666.908	680.249.751
PP =	1.253.203.600	1,842269839
	<u>357.666.908</u>	
PP =	42,04594521	0,153522487
PP = (dalam tahun dibagi 12)	3,503828768	

4.3.7	ARR		
	Total EAT : Umur Ekonomis		Rata rata investasi
	1.360.499.503		1.253.203.600
	<u>5</u>		<u>2</u>
	272.099.901		626.601.800

ARR	272.099.901	626.601.800
	<u>626.601.800</u>	<u>331.471.212</u>
	43%	53%

4.3.8	PI	
	1.360.499.503	
	<u>1.253.203.600</u>	
	1,085617295	

Ju

